

**RENJA
BIRO HUKUM
TAHUN 2020**



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja OPD tahun 2020 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai kerangka acuan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Biro Hukum pada khususnya. Hal mana Renja ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Renja ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Renja ini, dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang saling mendukung untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi nantinya.

Semoga Renja ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja, serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD.....	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	32
3.3. Program dan Kegiatan tahun 2020.....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	41
LAMPIRAN PRA-RKA.....	42
BAB V PENUTUP.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) terus berkembang, dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2020 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2019 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pembangunan Materi Hukum, Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Sarana dan Informasi Hukum, dan Peningkatan Penataan Perundang-undangan dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: : Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1), huruf (d) dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup : penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- i. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.
Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
 - Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.
- ii. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renja OPD.
Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- iii. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.
- iv. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.
 - Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :
 - Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.

- Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
- Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:
- Peraturan perundang-undangan terkait.
 - Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
 - Dokumen-dokumen.
 - Dokumen-dokumen RKPD.
 - Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
 - Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
 - Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
 - Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
 - Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan, disnergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud, diperlukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat. Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan, yaitu RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 (tiga) kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah –

langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan berbagai pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBN maupun APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
 - a. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2020. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

□ Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007
- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

- Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada NSPK, SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
 - **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
 - Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
 - Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarnya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD** (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kab/kota yang langsung

ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)

- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
 - a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun urusan sesuai tugas dan fungsi OPD.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
 - ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 - ✓ Pencapaian SDGs
 - ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Pencapaian NSPK dan SPM
 - ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - ✓ Pengembangan daerah terisolir
 - ✓ dst
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2018 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Untuk tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional,
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional,
3. Penyusunan Propem Perda Pemerintah Provinsi,
4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi,
5. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum,
6. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi,
7. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin,
8. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
9. Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,
10. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
11. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
12. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
13. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota, dan
14. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota,

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar **Rp. 2.682.660.810,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)** dan tambahan dana pada APBD perubahan tahun 2018 sebesar **Rp.494.540.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** pada 5 (lima) kegiatan urusan/wajib, yaitu Kegiatan Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, Kegiatan Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional, Kegiatan Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota, serta Kegiatan Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, dengan total anggaran tahun 2018 (awal+perubahan/pergeseran) sebesar **Rp. 3.177.200.810,-** serta tingkat capaian kinerja (target) sebesar **89,74%**.

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD/Unit kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir-Periode RENSTRA PD sd Tahun 2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2018-n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2019)		Cat
					Target Renja PD Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
4.00.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	35.600.000	4.800.750	6.000.000	2.588.700	43,15%	7.000.000	14.389.450	40,42%	
4.00.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Perkantoran	25.480.000	1.752.301	6.000.000	3.000.000	50,00%	3.000.000	7.752.301	30,43%	
4.00.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa JamINAN Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa JamINAN barang milik daerah	6.000.000	4.706.000	6.500.000	6.000.000	92,31%	10.000.000	20.706.000	345,10%	
4.00.01.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	72.950.000	17.368.600	20.086.560	15.405.705	76,70%	21.313.000	54.087.305	74,14%	
4.00.01.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan pengandaan untuk kelancaran kerja	160.160.000	30.558.725	41.570.200	28.154.000	67,73%	30.000.000	88.712.725	55,39%	
1.20.1.20.03.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	85.000.000	-	-	-	0,00%	15.000.000	15.000.000	0,00%	
4.00.01.01.03.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	188.260.000	18.900.000	30.000.000	18.900.000	63,00%	25.000.000	62.800.000	33,36%	
4.00.01.01.03.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan snack biro hukum	19.660.000	2.030.000	6.300.000	4.200.000	66,67%	5.000.000	11.230.000	57,12%	
4.00.01.01.03.01.17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	366.480.000	253.628.637	168.035.980	214.212.800	127,48%	240.000.000	707.841.437	193,15%	

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

Program Pembangunan Materi Hukum											
4.00.01.01.03.23.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Tertentuknya Produk Hukum Daerah Provinsi	2.986.900.000	870.656.620	747.778.160	626.496.698	83,78%	738.307.000	2.235.460.318	74,84%	
4.00.01.01.03.23.02	Peringkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya koordinasi dan tercapainya harmonisasi produk hukum daerah yang berbasis hukum nasional	476.000.000	181.779.100	179.238.240	167.967.950	93,71%	180.935.000	530.682.050	111,49%	
4.00.01.01.03.23.03	Penyusunan Proppem Perda Provinsi	Terlaksananya proses penyusunan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	322.000.000	103.973.300	116.678.520	104.008.800	89,14%	136.710.000	344.692.100	107,05%	
4.00.01.01.03.23.04	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi (Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah pd Th. 2019)	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	271.720.000	62.819.000	74.402.960	66.372.080	89,21%	100.000.000	229.191.080	84,35%	
Program Peningkatan Budaya Hukum											
4.00.01.01.03.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	102.000.000	-	57.340.080	49.385.000	0,00%	60.000.000	109.385.000	100%	Pindah program ke Program Sarana dan Informasi hukum

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM												
4.00.01.01.03.25.01 Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi												
1.20.1.20.03.03.36.08 Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota												
4.00.01.01.03.25.03 Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin												
4.00.01.01.03.25.04 Penulisan Hukum dan Hak Asasi Manusia												
4.00.01.01.03.25.05 Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota												
4.00.01.01.03.25.06 Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Monev dan Pelaporan RANHAM pd th. 2019)												
		Tersusunnya eksepsi/jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding gugatan terhadap pemerintah		696.000.000	115.489.000	219.103.920	138.855.400	63,37%	175.000.000	429.344.400	61,69%	
1.20.1.20.03.03.36.08	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertatihnya aparat yang mampu menangani kasus-kasus hukum		39.832.600	-	37.346.000	-	0,00%	-	-	0,00%	
4.00.01.01.03.25.03	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Tersalurinya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan		64.509.300	60.134.150	105.400.800	64.509.300	61,20%	126.000.000	250.643.450	388,54%	
4.00.01.01.03.25.04	Penulisan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tertaksananya pelatihan aparaturnya dan masyarakat penyuluh hukum dan nilai-nilai HAM		100.000.000	-	50.000.000	-	0,00%	-	-	0,00%	
4.00.01.01.03.25.05	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tertaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum		278.000.000	59.313.300	71.041.000	66.861.700	94,12%	80.000.000	206.175.000	74,16%	
4.00.01.01.03.25.06	Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Monev dan Pelaporan RANHAM pd th. 2019)	Tertentuknya POKJA RANHAM dan terlaksananya sosialisasi RANHAM		354.000.000	39.090.300	43.767.200	50.518.800	115,43%	80.000.000	169.609.100	47,91%	

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

Program Sarana dan Informasi Hukum												
4.00.01.01.03.26.01	<i>Pengeolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Sistem DJIH th. 2017)</i>	Terlaksananya Sistem Jaringan Dokumentasi dan terhimpunnya data Informasi hukum	1.065.000.000	114.050.597	133.936.800	125.484.800	93,69%	160.000.000	399.535.397	37,52%		
1.20.1.20.03.03.38.02	Peringkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya pengertahuan SDM pengelola SJDH	229.108.880	-	77.030.400	-	0,00%	-	-	0,00%		
1.20.1.20.03.03.38.03	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Informasi berbagai peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi kegiatannya dengan sosialisasi	51.000.000	-	44.274.960	-	0,00%	-	-	0,00%		
Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan												
4.00.01.01.03.27.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kab./Kota	645.520.640	166.087.641	226.565.800	92.877.900	40,99%	250.000.000	508.955.541	78,85%		
4.00.01.01.03.27.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian terhadap Klarifikasi Peraturan Daerah Kab./Kota	728.160.640	210.448.500	250.154.240	195.338.600	78,09%	300.000.000	705.787.100	96,93%		
4.00.01.01.03.27.03	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Tersedianya Klarifikasi Peraturan KIDH dan Peraturan DPRD Kab./Kota	725.258.600	251.991.300	199.170.600	195.877.000	98,35%	240.000.000	687.868.300	94,84%		
4.00.01.01.03.27.04	<i>Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota (tahun 2018)</i>	Terlaksananya pembinaan dalam rangka fasilitasi draft/rancangan produk hukum daerah Kab./Kota	354.337.600	-	190.102.600	198.808.500	0,00%	300.000.000	498.808.500	0,00%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 4 (empat) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan pada belanja langsung pokok, serta 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan pada belanja langsung urusan, dengan total 9 program dan 33 kegiatan di tahun 2018. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing – masing kegiatan telah cukup tinggi, dimana rata - rata tingkat capaian masing – masing indikator di atas 80% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja sampai indikator **Hasil (Outcomes)** dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian sebesar 42,53%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian sebesar 42,91%.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian sebesar 98,91%%.
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, capaian sebesar 96,55%.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian sebesar 99,78%.
6. Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian sebesar 99,96%.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian sebesar 100%.
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah, capaian sebesar 98,79%.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian sebesar 48,21%.
10. Pengadaan Meubeler, capaian sebesar 91,44%.
11. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, capaian sebesar 97,69%.
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, capaian sebesar 70,97%.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian sebesar 42,31%.
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Jaringan Komputerisasi, capaian sebesar 34,62%.
15. Pengelolaan, Pengawasan, dan Penggandaan Asset SKPD, capaian sebesar 99,98%.
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, capaian sebesar 78,90%.
17. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, capaian sebesar 99,30%.
18. Penatausahaan Keuangan SKPD, capaian sebesar 99,98%.
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, capaian sebesar 99,71%.

20. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, capaian sebesar 93,03%.
21. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Dan Nasional, capaian sebesar 94,59%.
22. Penyusunan Propem Perda Provinsi, capaian sebesar 92,56%.
23. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi, capaian sebesar 94,80%.
24. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum, capaian sebesar 60,82%.
25. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi, capaian sebesar 75,52%.
26. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, capaian sebesar 84,95%.
27. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kab/Kota, capaian sebesar 63,89%.
28. Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, capaian sebesar 85,61%.
29. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, capaian sebesar 89,87%.
30. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 84,78%.
31. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 82,05%.
32. Klarifikasi Peraturan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota, capaian sebesar 85,64%.
33. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 92,72%.

Data terlampir pada tabel T-C.30 berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan, sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2018 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah – langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan terwujudnya harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

b. Meningkatkan fasilitasi terhadap proses penelitian/koreksi produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/unit kerja pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud, masih ditemukannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) yang diajukan OPD/unit kerja pemrakarsa dilakukan secara tergesa-gesa ketika diproses pengkajian/penelitiannya pada Biro Hukum. Penetapan produk hukum daerah tersebut sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan OPD/unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah.

c. Kurangnya pemahaman OPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap OPD/unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/unit kerja tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/unit kerja di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga OPD/unit kerja terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

d. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

f. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

g. Kendala keterbatasan waktu dari Kabupaten/Kota yang menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih adanya Kab/Kota yang menyampaikan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda belum tepat waktu dan mendesak pada akhir tahun anggaran.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

h. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

i. Masih kurangnya pemahaman OPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM terampil sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2015 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terampil serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

k. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

l. Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selayaknya di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2017, terkait perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, maka Biro Hukum mengalami pengurangan 1 (satu) bagian, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Oleh karena itu Biro Hukum memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pada pelaksanaan Renja tahun 2019 dan 2020, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan yang ada dan baru agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2018, yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan penambahan/pergeseran dana, terutama pada belanja barang dan jasa pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, kegiatan yang bersifat urusan, dan penambahan dana murni pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 30.000.000,-; kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah sebesar Rp. 4.000.000,-; kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sebesar Rp. 49.626.700,-; kegiatan Pengadaan Meubeleur sebesar Rp. 15.000.000,-; kegiatan Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi sebesar Rp. 41.800.000,-; kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 5.000.000,-; kegiatan Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional sebesar Rp. 239.396.400,-; kegiatan Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah sebesar Rp. 11.883.200,-; kegiatan Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 32.523.900,-; kegiatan Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 50.515.400,-; dan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 50.336.000,-; sehingga total penambahan Biro Hukum (penambahan) sebesar Rp. 494.540.000,-.

Penambahan dana anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan adanya penambahan biaya pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten kota, biaya perjalanan dinas dalam rangka mendampingi DPRD Provinsi dalam kegiatan pembahasan produk hukum daerah, dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum lainnya, maka beberapa pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya tetap dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan dokumen penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018 tersebut.

Secara ringkas, data dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31 berikut :

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

TABEL 1-31
Review terhadap Rancangan awal RPPD tahun 2019
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumber	Meningkatnya kelancaran pengirim dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumber	Meningkatnya kelancaran pengirim dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	2.200.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumber	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	12 bulan	3.000.000	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumber	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	12 bulan	3.000.000	
3	Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	Sumber	Terseleksi, jasi, jaminan/suransi barang milik daerah	1 unit	10.000.000	Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	Sumber	Terseleksi, jasi, jaminan/suransi barang milik daerah	1 unit	10.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumber	Terseleksi, ketersediaan alat tulis kantor Biro Hukum	12 bulan	21.313.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumber	Terseleksi, ketersediaan alat tulis kantor Biro Hukum	12 bulan	16.492.100	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Sumber	Terseleksi, barang cetak dan penggantian Biro Hukum	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Sumber	Terseleksi, barang cetak dan penggantian Biro Hukum	12 bulan	24.553.975	
6	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumber	Terseleksi, bahan bacaan Biro Hukum	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumber	Terseleksi, bahan bacaan Biro Hukum	12 bulan	18.000.000	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Sumber	Terpenuhinya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah	12 bulan	240.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Sumber	Terpenuhinya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah	12 bulan	240.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumber	Terseleksi, makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	12 bulan	5.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumber	Terseleksi, makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	12 bulan	2.200.000	
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
9	Pengadaan Meubelur	Sumber	Terseleksi, peralatan kerja aparatur Biro Hukum	4 unit	20.000.000	Pengadaan Meubelur	Sumber	Terseleksi, peralatan kerja aparatur Biro Hukum	4 unit	10.000.000	
10	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Sumber	Terseleksi, peralatan kerja aparatur Biro Hukum	2 unit	40.000.000	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Sumber	Terseleksi, peralatan kerja aparatur Biro Hukum	2 unit	15.000.000	
11	Pemeliharaan Rutil/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumber	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	4 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Rutil/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumber	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	4 Unit	20.000.000	
12	Pemeliharaan Rutil/Berkala Perawatan dan Perbaikan Kantor	Sumber	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan perbaikan kantor aparatur Biro Hukum	5 unit/thn	3.000.000	Pemeliharaan Rutil/Berkala Perawatan dan Perbaikan Kantor	Sumber	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan perbaikan kantor aparatur Biro	5 unit/thn	1.750.000	
13	Pemeliharaan Rutil/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Sumber	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	6 unit/thn	5.000.000	Pemeliharaan Rutil/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputer	Sumber	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	6 unit/thn	3.300.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perbaikan Kantor	Sumber	Terseleksi, peralatan dan perbaikan kantor	3 unit	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perbaikan Kantor	Sumber	Terseleksi, peralatan dan perbaikan kantor	3 unit	7.000.000	
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumber	Terpenuhinya peningkatan pengetahuan aparatur	1 tahun	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumber	Terpenuhinya peningkatan pengetahuan aparatur	1 tahun	74.312.000	
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
16	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SVPD	Sumber	Teraksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SVPD	12 bulan	10.000.000	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	Sumber	Teraksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SVPD	12 bulan	8.200.000	
17	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SVPD	Sumber	Teraksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SVPD	12 bulan	10.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SVPD	Sumber	Teraksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SVPD	12 bulan	8.070.500	
18	Penatausahaan Keuangan SVPD	Sumber	Teraksananya pengelolaan keuangan SVPD	12 bulan	90.956.000	Penatausahaan Keuangan SVPD	Sumber	Teraksananya pengelolaan keuangan SVPD	12 bulan	129.989.100	
19	Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Aset SVPD	Sumber	Teraksananya Pengawasan dan Pengendalian Aset SVPD	12 bulan	29.989.000	Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Aset SVPD	Sumber	Teraksananya Pengawasan dan Pengendalian Aset SVPD	12 bulan	58.658.500	

<p>V Program Pengembangan Materi Hukum</p> <p>20. Pengaturan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya produk hukum daerah yang asertif, akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional</p>	<p>15 Perda, 85 Pergub, 750 Keppub</p>	<p>738.507.000</p> <p>Nasional</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya produk hukum daerah yang asertif, akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional</p>	<p>15 Perda, 85 Pergub, 750 Keppub</p>	<p>568.536.035</p>
<p>21. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya peningkatan koordinasi antar lembaga/institusi dalam rangka harmonisasi produk hukum</p>	<p>85 Pergub, 15 Perda, 750 Keppub dan 511 MOU</p>	<p>180.935.000</p> <p>Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya peningkatan koordinasi antar lembaga/institusi dalam rangka harmonisasi produk hukum</p>	<p>85 Pergub, 15 Perda, 750 Keppub dan 511 MOU</p>	<p>96.111.000</p>
<p>22. Penyusunan Program Perda Provinsi</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya penyusunan program pembentukan Perda provinsi</p>	<p>15 Korpolda</p>	<p>136.710.000</p> <p>Penyusunan Program Perda Provinsi</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya penyusunan program pembentukan Perda provinsi</p>	<p>15 Korpolda</p>	<p>79.274.400</p>
<p>23. Evaluasi dan Verifikasi Produk Hukum Provinsi</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya proses verifikasi Perda dan Pergub</p>	<p>15 Perda, 85 Pergub</p>	<p>100.000.000</p> <p>Evaluasi dan Verifikasi Produk Hukum Provinsi</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya proses verifikasi Perda dan Pergub</p>	<p>15 Perda, 85 Pergub</p>	<p>80.288.000</p>
<p>VI Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM</p>							
<p>24. Peningkatan Perkarat Pemerintah Provinsi</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi/pesidang</p>	<p>4 perkara</p>	<p>175.000.000</p> <p>Peningkatan Perkarat Pemerintah Provinsi</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi/pesidang</p>	<p>3 perkara</p>	<p>111.460.800</p>
<p>25. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya fasilitas pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berpekerja di pengadilan</p>	<p>6 perkara</p>	<p>126.000.000</p> <p>Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya fasilitas pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berpekerja di pengadilan</p>	<p>4 perkara</p>	<p>56.530.000</p>
<p>26. Monev dan Pelaporan RANHAM</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya laporan monitoring kota peduli (HAM) dan terdapatnya data produk hukum berspesifik HAM</p>	<p>1 laporan RANHAM</p>	<p>80.000.000</p> <p>Monev dan Pelaporan RANHAM</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya laporan monitoring kota peduli (HAM) dan terdapatnya data produk hukum berspesifik HAM</p>	<p>1 laporan RANHAM</p>	<p>60.709.600</p>
<p>27. Peningkatan Pemmasalahan Hukum di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam</p>	<p>5 kasus</p>	<p>80.000.000</p> <p>Peningkatan Pemmasalahan Hukum di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam</p>	<p>5 kasus</p>	<p>38.124.400</p>
<p>VII Program Summa dan Informasi Hukum</p>							
<p>28. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum</p>	<p>19 Kab/Kota</p>	<p>60.000.000</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum</p>	<p>19 Kab/Kota</p>	<p>27.728.000</p>
<p>29. Pengelobahan Anggaran Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya SIDH dan kemudahan pelaksanaan informasi</p>	<p>300 buku</p>	<p>160.000.000</p> <p>Pengelobahan Anggaran Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya SIDH dan kemudahan pelaksanaan informasi</p>	<p>222 buku</p>	<p>86.187.000</p>
<p>VIII Program Peningkatan Peranan Perundang-undangan</p>							
<p>30. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi</p>	<p>20 Bependa Kab/Kota</p>	<p>250.000.000</p> <p>Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi</p>	<p>20 Bependa Kab/Kota</p>	<p>120.633.000</p>
<p>31. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah</p>	<p>30 Perda</p>	<p>300.000.000</p> <p>Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah</p>	<p>30 Perda</p>	<p>116.078.700</p>
<p>32. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan kepala daerah dan DPRD</p>	<p>30 Perda/Per DPRD Kab/Kota</p>	<p>240.000.000</p> <p>Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan kepala daerah dan DPRD</p>	<p>30 Perda/Per DPRD Kab/Kota</p>	<p>99.894.000</p>
<p>33. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota</p>		<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>30 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota</p>	<p>300.000.000</p> <p>Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota</p>	<p>Sumber</p> <p>Terdapatnya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>30 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota</p>	<p>165.792.800</p>

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2019 dan juga rencana kerja tahun 2020, diantaranya program yang berkenaan dengan pembangunan materi hukum, peningkatan budaya hukum (dialihkan kegiatannya ke program Sarana dan Informasi Hukum), peningkatan supremasi hukum dan perlindungan HAM, sarana dan informasi hukum, dan peningkatan penataan perundang-undangan yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	7.422.224	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbardaya Air dan Listrik	Sumbar	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	3.000.000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sumbar	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	10.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumbar	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	50.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumbar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	56.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumbar	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	30.000.000	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Sumbar	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan	208.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumbar	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	5.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
9	Penggadaan Meubeleur	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	15.000.000	
10	Penggadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	30.000.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	25.894.464	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur	3.000.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Teraksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur	3.000.000	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum	40.000.000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	162.353.422	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbar	Teraksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	5.000.000	
18	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sumbar	Teraksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	7.000.000	
19	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sumbar	Teraksananya pengelolaan keuangan SKPD	110.325.393	
20	Bengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Sumbar	Teraksananya Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	30.000.000	

<p>V</p> <p>Program Pembangunan Materi Hukum</p>	<p>Sumber</p>	<p>Terbentuknya produk hukum daerah yang aspiratif akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional</p>	<p>866.151.756</p>
<p>21) Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional</p>	<p>Sumber</p>	<p>Terwujudnya peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka harmonisasi produk hukum</p>	<p>155.000.000</p>
<p>22) Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi</p>	<p>130.000.000</p>
<p>23) Penyusunan Propem Perda Provinsi</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub</p>	<p>100.000.000</p>
<p>24) Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah</p>	<p>Sumber</p>	<p></p>	<p></p>
<p>VI</p> <p>Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM</p>	<p>Sumber</p>	<p>Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersitat litigasi/persidangan</p>	<p>200.000.000</p>
<p>25) Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tersalurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan</p>	<p>120.000.000</p>
<p>26) Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya aporan monitoring kota peduli HAM dan tersedianya data produk hukum daerah berperspektif HAM</p>	<p>100.000.000</p>
<p>27) Monev dan Pelaporan RANHAM</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan permasalahan hukum</p>	<p>78.966.185</p>
<p>28) Penanganan Permasalahan Hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>Sumber</p>	<p></p>	<p></p>
<p>VII</p> <p>Program Sarana dan Informasi Hukum</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang</p>	<p>63.118.353</p>
<p>29) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum</p>	<p>Sumber</p>	<p>Terkelolanya SIDH dan kemudahan pengaksesan informasi</p>	<p>175.000.000</p>
<p>30) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<p>Sumber</p>	<p></p>	<p></p>
<p>VIII</p> <p>Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi</p>	<p>320.000.000</p>
<p>30) Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sumber</p>	<p>sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p></p>
<p>31) Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>270.000.000</p>
<p>32) Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>239.768.203</p>
<p>33) Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota</p>	<p>Sumber</p>	<p>Tertaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>350.000.000</p>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis unit kerja dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dalam upaya membangun dan memajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat 2000-2025, yakni **"Mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh dan Bersih Dalam Semangat Kebersamaan"**. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2020 diarahkan pada upaya mewujudkan "Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, akomodatif, dan berlaku efektif serta meningkatnya bantuan hukum, dokumentasi hukum, pemajuan dan perlindungan HAM melalui pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah serta penyebarluasan informasi hukum".

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment serta meningkatkan pelayanan kepada sektor publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap OPD provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan

Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif. Secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD Provinsi dan instansi vertikal;

- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD/instansi vertikal terkait;
- c. Mengadakan rapat klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah provinsi dengan OPD Provinsi/instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD Provinsi;
- e. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan OPD/instansi vertikal;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyusunan Prolegda Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD/instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- i. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

2. Pelayanan Dokumentasi, bantuan hukum dan HAM

Pelayanan dokumentasi diselenggarakan dalam rangka tersedianya sarana dan informasi hukum yang berkualitas, dan pelayanan bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan HAM. Secara umum pelayanan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. Menyediakan CD peraturan perundang-undangan berupa informasi mengenai produk hukum daerah;
- d. Mendokumentasikan Berita Daerah, Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
- e. Melakukan pelayanan peminjaman buku dan peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat;
- f. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin serta fasilitasi proses bantuan hukum bagi instansi terkait yang mempunyai permasalahan hukum;
- g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan bantuan hukum/advokasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan aset daerah yang bermasalah dan peraturan daerah yang mempunyai sanksi hukum dengan melibatkan instansi terkait/teknis;

- h. Menyiapkan kajian hukum guna memberikan pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Kepala Daerah terkait dengan permasalahan hukum kepada Kepala Daerah dan dalam hal pengelolaan aset pemerintah provinsi yang bermasalah maupun permasalahan hukum lainnya;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi terkait mencakup penyelesaian perkara di pengadilan;
- j. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat dalam mengambil kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutamaan HAM (*Human Rights Mainstreaming*);
- k. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur sebagai kuasa hukum pemerintah daerah serta terwujudnya koordinasi yang baik dalam rangka penegakkan supremasi hukum;
- l. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait permasalahan hukum terkait dengan aset pemerintah daerah yang digugat oleh masyarakat/pihak ketiga.

3. Pelayanan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota

Pelayanan Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum Kabupaten/Kota yang berkualitas, berlaku efisien dan efektif. Secara umum pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka klarifikasi;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- c. Mengadakan rapat evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dengan tim evaluasi dan tim klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

- f. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan Renja tahun 2020, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas serta berlaku efektif dan efisien baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
2. Terwujudnya penegakan dan tertib hukum dalam masyarakat serta perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
3. Tersedianya sarana dan informasi produk hukum nasional dan daerah yang lengkap dan akurat.

Dengan sasaran yang meliputi :

1. Terciptanya produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aspiratif dan akomodatif.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional.
3. Terwujudnya daftar inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Pemerintah Provinsi.
4. Terbentuknya produk hukum Provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat Pusat yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terlaksananya rakor Propem Perda bagi aparaturnya pemerintah penyusun peraturan perundang-undangan lingkup provinsi.
6. Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan serta monitoring pendataan kasus-kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah.
7. Terwujudnya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.
8. Terwujudnya sosialisasi dan monitoring pelaksanaan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).
9. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi serta pelaporan rapat koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pembinaan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota, khususnya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD lingkup Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terwujudnya kemudahan mengakses informasi hukum.
14. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 8 program dengan 33 kegiatan pada tahun 2019, total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 2.361.285.920,- dimana rumusan program sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatannya, sedangkan pagu indikatifnya disesuaikan dengan pagu anggaran pada Renja tahun 2019 (yang mengacu pada RPJMD) dan dirasionalisasi kembali sesuai hasil verifikasi dan evaluasi anggaran yang dapat diakomodir. Untuk tahun 2020, Biro Hukum merencanakan 8 Program dengan 33 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.969.000.000,- yang disesuaikan dengan proyeksi tahun berjalan (2019) dan prakiraan maju tahun 2020 yang tertuang pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut :

TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorf (Rp. 000)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorf (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>										
4.00.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	Sumbar	12 bulan	7.422.224	APBD		12 bulan	8.906.669	
4.00.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terperuhnya jasa komunikasi Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	3.000.000	APBD		12 bulan	3.600.000	
4.00.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	Sumbar	2 unit mobil/kendaraan roda 4	10.000.000	APBD		2 unit mobil/kendaraan roda 4	12.000.000	
4.00.01.01.03.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000	
4.00.01.01.03.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	56.170.000	APBD		12 bulan	67.404.000	
4.00.01.01.03.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	36.000.000	
4.00.01.01.03.01.15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan	Sumbar	12 bulan	208.000.000	APBD		12 bulan	249.600.000	
4.00.01.01.03.01.24	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	4.830.000	APBD		12 bulan	5.796.000	

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

Kode	Urusan/bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Praktiran Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp. 000)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4.00.01.01.03.02.01	Pengadaan Meubelur	Tersedianya sarana penyimpanan dokumen OPD	Sumbar	3 unit lemari arsip	15.000.000	APBD		2 unit lemari arsip	18.000.000
1.20.1.20.03.03.02.02	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer/PC, Laptop, dan Printer	Sumbar	5 unit (3 unit PC, 2 unit printer)	30.000.000	APBD		5 unit (3 unit PC, 2 unit printer)	36.000.000
4.00.01.01.03.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dan motor	Sumbar	4 unit (2 unit mobil, 2 unit motor)	25.894.464	APBD		4 unit (2 unit mobil, 2 unit motor)	31.073.357
4.00.01.01.03.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	Sumbar	9 unit (8 unit AC, 1 unit mesin ketik)	3.000.000	APBD		9 unit (8 unit AC, 1 unit mesin ketik)	3.600.000
4.00.01.01.03.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	5 unit/tahun (2 unit PC, 2 unit laptop, 1 unit printer)	3.000.000	APBD		6 unit/tahun (2 unit PC, 2 unit laptop, 2 unit printer)	3.600.000
4.00.01.01.03.02.371	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	3 unit (2 unit AC, 1 unit mesin fotokopi)	40.000.000	APBD		3 unit AC	48.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4.00.01.01.03.04.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	Sumbar	1 tahun	162.353.422	APBD		1 tahun	194.824.106
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4.00.01.01.03.05.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Sumbar	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	6.000.000
4.00.01.01.03.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	Sumbar	12 bulan	7.000.000	APBD		12 bulan	8.400.000
4.00.01.01.03.05.02	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Sumbar	12 bulan	110.325.393	APBD		12 bulan	132.390.472
4.00.01.01.03.05.19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	Sumbar	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	36.000.000

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020							Praktisraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Program Pembangunan Materi Hukum											
4.00.01.01.03.224.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	Sumber	15 Perda, 60 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	866.151.756	APBD		15 Perda, 60 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	1.039.382.107		
4.00.01.01.03.224.02	Peningkatan Kelengkapan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional	Sumber	15 Perda, 60 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	155.000.000	APBD		15 Perda, 60 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	186.000.000		
4.00.01.01.03.224.03	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi dan rencana pembentukan Perda di luar program	Sumber	Daftar Propem Perda	130.000.000	APBD		Daftar Propem Perda	156.000.000		
4.00.01.01.03.224.05	Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	Sumber	15 Perda, dan 60 Pergub	100.000.000	APBD		15 Perda, dan 60 Pergub	120.000.000		
Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum											
4.00.01.01.03.225.01	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya fasilitasi pemberian advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	Sumber	Bantuan advokasi sebanyak 12 perkara	120.000.000	APBD		Bantuan advokasi sebanyak 12 perkara	144.000.000		
4.00.01.01.03.225.02	Penanganan Permasalahan Hukum di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	Sumber	5 kasus	78.966.185	APBD		5 kasus	94.759.422		
4.00.01.01.03.225.03	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus di pengadilan	Sumber	Penyelesaian 4 perkara	200.000.000	APBD		Penyelesaian 4 perkara	240.000.000		
4.00.01.01.03.225.04	Moneyv dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Tersedianya laporan RANHAM dan data produk hukum yang berpengaruh HAM	Sumber	1 Laporan RANHAM	100.000.000	APBD		1 Laporan RANHAM dan Daftar Produk Hukum Perspektif HAM	120.000.000		

Revisi Biro Hukum Tahun 2020

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Sarana dan Informasi Hukum										
4.00.01.01.03.226.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	Sumbang	19 Kab./Kota	63.118.353	APBD		19 Kab./Kota	75.742.024	
4.00.01.01.03.226.03	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya SIDIH dan pengelolaan produk hukum	Sumbang	100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	175.000.000	APBD		100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	210.000.000	
Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan										
4.00.01.01.03.227.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbang	45 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	320.000.000	APBD		45 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	384.000.000	
4.00.01.01.03.227.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab./Kota	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbang	45 produk hukum Kab./Kota	270.000.000	APBD		45 produk hukum Kab./Kota	324.000.000	
4.00.01.01.03.227.03	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbang	45 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	239.768.203	APBD		45 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	287.721.844	
4.00.01.01.03.227.04	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah Kab./Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbang	50 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	350.000.000	APBD	Usulan kegiatan baru	50 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	420.000.000	
JUMLAH					3.969.000.000			JUMLAH	4.762.800.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD


Rencana kerja dan pendanaan OPD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dimana rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk rencana kerja dan pendanaan OPD pada tahun 2020 dapat dijelaskan melalui tabel pada lampiran PRA-RKA Tahun 2020 berikut :

LAMPIRAN

PRA RKA TAHUN 2020



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2019

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020					Formulir RKA - OPD 2.2	
Urusan Pemerintahan : Fungsi Lainnya								
Organisasi/Unit Kerja : Sekretariat Daerah (Biro Hukum)								
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Program dan Kegiatan								
Kode		Uraian	Pagu Indikatif Tahun 2020				Keterangan	
Program	Kegiatan		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	
BELANJA LANGSUNG			-	3.878.000.000	91.000.000	3.969.000.000		
4 00 01 01 03 01	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	363.422.224	6.000.000	369.422.224		
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	7.422.224	-	7.422.224		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	-	3.000.000	-	3.000.000		
	06	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	10.000.000	-	10.000.000		
	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	50.000.000	-	50.000.000		
	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	56.170.000	-	56.170.000		
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	24.000.000	6.000.000	30.000.000		
	15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	-	208.000.000	-	208.000.000		
	24	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	4.830.000	-	4.830.000		
4 00 01 01 03 02	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	31.894.464	85.000.000	116.894.464		
	01	Pengadaan Meubeleur	-	-	15.000.000	15.000.000		
	02	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-	-	30.000.000	30.000.000		
	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	25.894.464	-	25.894.464		
	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	3.000.000	-	3.000.000		
	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-	3.000.000	-	3.000.000		
	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	40.000.000	40.000.000		
4 00 01 01 03 04	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	162.353.422	-	162.353.422		
	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	-	162.353.422	-	162.353.422		
4 00 01 01 03 05	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	-	152.325.393	-	152.325.393		
	01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	5.000.000	-	5.000.000		
	02	Penatausahaan Keuangan SKPD	-	110.325.393	-	110.325.393		
	03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.000.000	-	7.000.000		
	19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	-	30.000.000	-	30.000.000		
4 00 01 01 03 224	V	Program Pembangunan Materi Hukum	-	1.251.151.756	-	1.251.151.756		
	01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	-	866.151.756	-	866.151.756		
	02	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	-	155.000.000	-	155.000.000		
	03	Penyusunan Propem Perda Provinsi	-	130.000.000	-	130.000.000		
	05	Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah	-	100.000.000	-	100.000.000		
4 00 01 01 03 225	VI	Program Peningkatan Supremasi Hukum Dan Perlindungan Hukum	-	498.966.185	-	498.966.185		
	01	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	-	120.000.000	-	120.000.000		
	02	Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kab/Kota	-	78.966.185	-	78.966.185		
	03	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	-	200.000.000	-	200.000.000		
	04	Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	-	100.000.000	-	100.000.000		
4 00 01 01 03 226	VII	Program Sarana dan Informasi Hukum	-	238.118.353	-	238.118.353		
	01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	-	63.118.353	-	63.118.353		
	03	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	-	175.000.000	-	175.000.000		
4 00 01 01 03 227	VIII	Program Peningkatan Penataan Peraturan PerUndang-undangan	-	1.179.768.203	-	1.179.768.203		
	01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	-	320.000.000	-	320.000.000		
	02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	-	270.000.000	-	270.000.000		
	03	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	-	239.768.203	-	239.768.203		
	04	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	-	350.000.000	-	350.000.000		
J U M L A H			-	3.878.000.000	91.000.000	3.969.000.000		

Keterangan : Program = 8
Kegiatan = 33

Padang, 2019


Mengetahui,


KEPALA BIRO HUKUM




ENIFITA DJINIS, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA-OPD 2.2.1		
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.01.01				
PROVINSI SUMATERA BARAT							
TAHUN ANGGARAN 2020							
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya		
Organisasi :	4	00	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Kegiatan :	4	00	01	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020						
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat						
Sumber Dana :	APBD						
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	2.100.000			-,-		
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	7.422.224			-,-		
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	8.906.669			-,-		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%				
Masukan	Jumlah dana		Rp. 7.422.224 ,-				
Keluaran	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat		12 bulan				
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Hrg Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5		
5 2	BELANJA LANGSUNG				7.422.224		
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				7.422.224		
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.422.224		
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos - Materai Tata Usaha (Rp. 6.000,-) - Materai Tata Usaha (Rp. 3.000,-)	100 150	lbr lbr	6.000 3.000	600.000 450.000		
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan) - BBM	1	ls	2.226.667	2.226.667		
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				4.145.557		
5 2 2 03 0007	Belanja pake/pengiriman - Pengiriman surat	1	tahun	4.145.557	4.145.557		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					7.422.224		
Triwulan I		Padang, 2019					
Triwulan II		An SEKRETARIS DAERAH					
Triwulan III		ASISTEN PEMERINTAHAN					
Triwulan IV		Ub. KEPALA BIRO HUKUM					
							
		ENIFITA DJINIS, SH					
		Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004					
TIM ANGGARAN							
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN			
1							
2							
3							
4							

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-OPD 4.00.01.01.03.01.02		FORMULIR RKA - OPD 2.2.1			
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020							
Urusan Pemerintahan	: 4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi	: 4	00	01	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program	: 4	00	01	01	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Kegiatan	: 4	00	01	01	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat							
Sumber Dana	: APBD							
Jumlah Tahun 2019	: Rp.		3.000.000 ,-					
Jumlah Tahun 2020	: Rp.		3.000.000 ,-					
Jumlah Tahun 2021	: Rp.		3.600.000 ,-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100%				
Masukan	Jumlah dana			Rp. 3.000.000 ,-				
Keluaran	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum			12 bulan				
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda								
Rincian Rencana kerja dan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				3.000.000			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3.000.000			
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				3.000.000			
5 2 2 03 01	Belanja Telepon				3.000.000			
	- Telepon (1 line/tahun)	1	tahun	3.000.000	3.000.000			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					3.000.000			
Triwulan I		Padang, 2019						
Triwulan II		An SEKRETARIS DAERAH						
Triwulan III		ASISTEN PEMERINTAHAN						
Triwulan IV		Ub. KEPALA BIRO HUKUM						
		 ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004						
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1								
2								
3								
4								

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-SKPD		FORMULIR RKA- OPD 2.2.1			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.01.06					
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi :	4	00	01	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	01	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Kegiatan :	4	00	01	01	03	01	06	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat							
Sumber Dana :	APBD							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	10.000.000	-					
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	10.000.000	-					
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	12.000.000	-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA					
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%					
Masukan	Jumlah dana		Rp. 10.000.000 ,-					
Keluaran	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah		2 Unit Mobil/Kendaraan roda 4					
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				10.000.000			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				10.000.000			
5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi							
5 2 2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - Kendaraan dinas operasional	2	unit	5.000.000	10.000.000			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					10.000.000			
Triwulan I :								
Triwulan II :								
Triwulan III :								
Triwulan IV :								
Padang, 2019 An SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub, KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004								
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1								
2								
3								
4								


INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%
Masukan	Jumlah dana		Rp. 50.000.000 ,-	
Keluaran	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum		12 bulan	
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	

Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum Setda

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2 2 01	BELANJA LANGSUNG				50.000.000
5 2 2 01	BELANJA BARANG DAN JASA				50.000.000
5 2 2 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				50.000.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				15.012.200
	- Kertas HVS Folio	100	rim	51.500	5.150.000
	- Kertas HVS Kwarto/A4	10	rim	49.600	496.000
	- Buku Agenda Folio (Isi 200 lbr)	12	bh	47.000	564.000
	- Buku Ekspedisi (Isi 100 lbr)	12	bh	18.400	220.800
	- Pena My gell	24	kotak	72.500	1.740.000
	- Isi Pena My gell	24	kotak	54.500	1.308.000
	- Pensil	6	lusin	58.000	348.000
	- Karet Penghapus	1	lusin	36.500	36.500
	- Spidol Permanen	12	bh	9.700	116.400
	- Spidol White Board	12	bh	10.300	123.600
	- Tip ex 30 ml	12	ktk	16.000	192.000
	- Amplop putih kabinet (90)	6	ktk	25.400	152.400
	- Amplop putih kecil (104)	6	ktk	18.200	109.200
	- Map Klip /Scnelcheter map	201	bh	7.300	1.467.300
	- Ordner Karton	24	bh	27.800	667.200
	- Ordner Plastik	24	bh	48.300	1.159.200
	- Box File Karton	24	bh	30.200	724.800
	- Box File Plastik	24	bh	18.200	436.800
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis				34.987.800
	- Binder Klip Kecil	36	ktk	8.500	306.000
	- Binder Klip Sedang	36	ktk	10.300	370.800
	- Binder Klip Besar	36	ktk	12.100	435.600
	- Klip Paper Trigonal	12	ktk	30.200	362.400
	- Isi Hackter Kecil	36	ktk	17.000	612.000
	- Isi Hackter Besar	6	ktk	26.500	159.000
	- Hackter/stapler kecil	6	buah	23.600	141.600
	- Hackter/stapler besar	1	buah	72.450	72.450
	- Bantal stempel	6	buah	18.200	109.200
	- Tinta Stempel (100 cc)	6	ttl	15.700	94.200
	- Isolasi bening	6	rol	18.800	112.800
	- Isolasi blinnen	6	rol	24.150	144.900
	- Isolasi hitam besar	6	rol	20.600	123.600
	- Toner 85 A	12	bh	1.000.000	12.000.000
	- Toner 35 A	12	bh	1.000.000	12.000.000
	- Catridge tinta printer	24	bh	255.000	6.120.000
	- FlashDisk	1	unit	100.000	100.000
	- Keyboard	7	buah	100.000	700.000
	- Mouse	6	buah	100.000	600.000
	- Tali rafi	1	roll	1.050	1.050
	- Pita Mesin Tik	2	buah	29.600	59.200
	- Pita Printer Dot Matriks	6	buah	60.500	363.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					50.000.000

Padang, 2019
An SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
Ub. KEPALA BIRO HUKUM


ENIFITA DJINIS, SH
Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004

TIM ANGGARAN				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	NOMOR RKA-OPD	FORMULIR RKA-OPD 2.2.1
	UNIT KERJA	4.00.01.01.03.01.09	
PROVINSI SUMATERA BARAT			
TAHUN ANGGARAN 2020			

Urusan Pemerintahan : 4 00 01 01 Fungsi Lainnya
 Organisasi : 4 00 01 01 03 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
 Program : 4 00 01 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan : 4 00 01 01 03 01 09 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
 Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat
 Sumber Dana : APBD

 Jumlah Tahun 2019 : Rp. 24.553.925 ,-
 Jumlah Tahun 2020 : Rp. 56.170.000 ,-
 Jumlah Tahun 2021 : Rp. 67.404.000 ,-

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
Masukan	Jumlah dana	Rp. 56.170.000 ,-
Keluaran	Tersedianya barang cetak dan penggandaan Biro Hukum	12 bulan
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%


Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Sekretariat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				56.170.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				56.170.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				56.170.000
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				48.093.750
	- Kertas Kop Gubernur	5	rim	114.830	574.150
	- Kertas Kop Setda	10	rim	114.800	1.148.000
	- Amplop Kop Gubernur	5	ktk	60.400	302.000
	- Amplop Kop Setda	30	ktk	60.400	1.812.000
	- Map Dinas Biro Hukum	4.500	lbr	7.300	32.850.000
	- Blanko Disposisi	12	buku	42.300	507.600
	- Blanko SPPD Cet TB	50	buku	144.000	7.200.000
	- Blanko Kwitansi	50	buku	74.000	3.700.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				8.076.250
	- Penggandaan	30.385	lbr	250	7.596.250
	- Penjilidan	12	kulit/lbr	40.000	480.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					56.170.000



Triwulan I : _____
 Triwulan II : _____
 Triwulan III : _____
 Triwulan IV : _____


Padang, 2019
 An SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 Ub. KEPALA BIRO HUKUM



ENIFITA DJINIS, SH
 Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004


TIM ANGGARAN


NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-OPD 4.00.01.01.03.01.13		FORMULIR RKA-OPD 2.2.1			
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020							
Urusan Pemerintahan : 4 00 01 01 Fungsi Lainnya Organisasi : 4 00 01 01 03 Sekretariat Daerah (Biro Hukum) Program : 4 00 01 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 4 00 01 01 03 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020 Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat Sumber Dana : APBD Jumlah Tahun 2019 : Rp. 18.000.000 ,- Jumlah Tahun 2020 : Rp. 30.000.000 ,- Jumlah Tahun 2021 : Rp. 36.000.000 ,-								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR		TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA				
Capaian Program		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				
Masukan		Jumlah dana		Rp. 30.000.000 ,-				
Keluaran		Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum		12 bulan				
Hasil		Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan		Jumlah		
1		2		Volume		Satuan	Hrg Satuan	6 = 3 X 5
5 2		BELANJA LANGSUNG						30.000.000
5 2 2		BELANJA BARANG DAN JASA						24.000.000
5 2 2 03		Belanja Jasa Kantor						24.000.000
5 2 2 03 05		Belanja Surat Kabar/Majalah						24.000.000
		- Surat Kabar Lokal (2 harian x 12 org x 12 bln)		24		bln	500.000	12.000.000
		- Surat Kabar Nasional (2 x 12 bln)		24		bln	150.000	3.600.000
		- Majalah Nasional (2 x 12 bln)		24		bln	350.000	8.400.000
5 2 3 83		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan						6.000.000
5 2 3 83 01		Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan						6.000.000
		- Buku Peraturan Perundang-Undangan/Pengayaan Pustaka		1		tahun	6.000.000	6.000.000
		- Hukum						
JUMLAH BELANJA LANGSUNG								30.000.000
Triwulan I :				Padang,		2019		
Triwulan II :				An SEKRETARIS DAERAH				
Triwulan III :				ASISTEN PEMERINTAHAN				
Triwulan IV :				Ub. KEPALA BIRO HUKUM				
								
				ENIFITA DJINIS, SH				
				Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004				
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA			NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1								
2								
3								
4								


SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-OPD	FORMULIR RKA-OPD 2.2.1				
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020		4.00.01.01.03.01.15					
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi :	4	00	01	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	01	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Kegiatan :	4	00	01	01	03	01	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat							
Sumber Dana :	A P B D							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	240.702.000	,-					
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	208.000.000	,-					
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	249.600.000	,-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%				
Masukan	Jumlah dana			Rp. 208.000.000 -				
Keluaran	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat			12 bulan				
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				208.000.000			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				208.000.000			
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.947.200			
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				11.947.200			
	- BBM perjalanan dinas	1	LS	2.500.400	2.500.400			
	- BBM operasional	1	LS	9.446.800	9.446.800			
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				196.052.800			
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				49.480.000			
	Dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan rapat lainnya							
	- Eselon II (1 org x 2 hr x 10 kl)	20	OH	500.000	10.000.000			
	Uang Representasi (1 org x 2 hr x 10 kl)	20	OH	250.000	5.000.000			
	Uang Penginapan Eselon II/IV (1 org X 1 mlm X 10 Kali)	10	OM	1.000.000	10.000.000			
	- Eselon III/IV/Staf Gol IV (1 org x 2 hr x 9 kl)	18	OH	500.000	9.000.000			
	Uang Penginapan Eselon III/IV (1 org X 1 mlm X 9 Kali)	9	OM	600.000	5.400.000			
	- Staf Gol III/IV/Sopir (1 org x 2 hr x 9 kl)	18	OH	360.000	6.480.000			
	Uang Penginapan Staf (1 org X 1 mlm X 9 Kali)	9	OM	400.000	3.600.000			
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				146.572.800			
	Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke kementerian dan lembaga terkait							
	- Eselon II (1 org x 3 hr x 12 kl)	36	OH	1.200.000	43.200.000			
	- Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 12 kl)	36	OH	400.000	14.400.000			
	- Uang penginapan eselon II (1 org x 2 hr x 12 kl)	24	OM	1.490.000	35.760.000			
	- Tiket + Airport Tax (PP)	12	OT	3.542.400	42.508.800			
	- Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 12 kl)	24	OK	190.000	4.560.000			
	- Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 12 kl)	24	OK	256.000	6.144.000			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					208.000.000			
Triwulan I :								
Triwulan II :								
Triwulan III :								
Triwulan IV :								
Padang, 2019 An SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004								
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1								
2								
3								
4								



SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA - OPD 2.2.1			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.01.24					
PROVINSI SUMATERA BARAT								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan	: 4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi	: 4	00	01	01	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)			
Program	: 4	00	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 4	00	01	01	03	01	24	Penyediaan makanan dan minuman
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat							
Sumber Dana	: APBD							
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	2.100.000,-						
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	4.830.000,-						
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	5.796.000,-						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%				
Masukan	Jumlah dana			Rp. 4.830.000,-				
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum			12 bulan				
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				4.830.000			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				4.830.000			
5 2 2 11	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>				4.830.000			
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack kotak	230	kotak	21.000	4.830.000			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					4.830.000			
Triwulan I :		Padang, 2019						
Triwulan II :		An SEKRETARIS DAERAH						
Triwulan III :		ASISTEN PEMERINTAHAN						
Triwulan IV :		Ub. KEPALA BIRO HUKUM						
		 ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004						
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1								
2								
3								
4								



SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-SKPD		FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020		4.00.01.01.03.02.01		
Urusan Pemerintahan	:	4 00 01 01	:	Fungsi Lainnya	
Organisasi	:	4 00 01 01 03	:	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	
Program	:	4 00 01 01 03 02	:	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
Kegiatan	:	4 00 01 01 03 02 01	:	Pengadaan Meubeleur	
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s/d Desember 2020			
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat			
Sumber Dana	:	APBD			
Jumlah Tahun 2019	:	Rp.	10.000.000	,-	
Jumlah Tahun 2020	:	Rp.	15.000.000	,-	
Jumlah Tahun 2021	:	Rp.	18.000.000	,-	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
Capaian Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	
Masukan	Jumlah dana			Rp. 15.000.000 ,-	
Keluaran	Tersedianya sarana penyimpanan dokumen OPD			3 unit lemari arsip	
Hasil	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Sekretariat Daerah					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				15.000.000
5 2 3	BELANJA MODAL				15.000.000
5 2 3 30	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</i>				15.000.000
5 2 3 30 07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat - Lemari arsip	3	unit	5.000.000	15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					15.000.000
Triwulan I	:				
Triwulan II	:				
Triwulan III	:				
Triwulan IV	:				
Padang, 2019 An SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004					
TIM ANGGARAN					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					


SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-SKPD		FORMULIR RKA- OPD 2.2.1
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020		4.00.01.01.03.02.02		
Urusan Pemerintahan	:	4 00 01 01	:	Pemerintahan Umum	
Organisasi	:	4 00 01 01 03	:	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	
Program	:	4 00 01 01 03 02	:	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
Kegiatan	:	4 00 01 01 03 02 02	:	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s/d Desember 2020			
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat			
Sumber Dana	:	APBD			
Jumlah Tahun 2019	:	Rp.	15.000.000	,-	
Jumlah Tahun 2020	:	Rp.	30.000.000	,-	
Jumlah Tahun 2021	:	Rp.	36.000.000	,-	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
Capaian Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	
Masukan	Jumlah dana			Rp. 30.000.000 ,-	
Keluaran	Tersedianya Komputer/PC, dan Printer			5 unit (3 unit PC, 2 unit printer)	
Hasil	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Sekretariat Daerah					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				30.000.000
5 2 3	BELANJA MODAL				30.000.000
5 2 3 29	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer</i>				21.000.000
5 2 3 29 04	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</i>				21.000.000
	- Komputer/PC Desktop	3	unit	7.000.000	21.000.000
5 2 3 29 06	<i>Belanja Modal Pengadaan Printer / Ploter</i>				9.000.000
	- Printer Inkjet Multifungsi	1	Unit	3.000.000	3.000.000
	- Printer Laserjet Multifungsi	1	Unit	6.000.000	6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					30.000.000
Triwulan I	:				
Triwulan II	:				
Triwulan III	:				
Triwulan IV	:				
<p style="text-align: right;">Padang, 2019 An SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM</p> <p style="text-align: center;"> ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004</p>					
TIM ANGGARAN					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					


SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA- OPD 2.2.1		
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.02.06				
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020							
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya		
Organisasi :	4	00	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	03	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
Kegiatan :	4	00	01	03	02	06	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020						
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat						
Sumber Dana :	APBD						
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	20.000.000			-		
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	25.894.464			-		
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	31.073.357			-		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				
Masukan	Jumlah dana		Rp. 25.894.464 ,-				
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dan motor dinas/operasional		4 Unit (2 unit mobil, 2 unit motor)				
Hasil	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Hrg Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5		
5 2	BELANJA LANGSUNG				25.894.464		
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25.894.464		
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				25.894.464		
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service				6.000.000		
	- Kendaraan Roda 2 (dua) x 2 Unit	1	tahun	1.000.000	1.000.000		
	- Kendaraan Roda 4 (empat) x 2 unit	1	tahun	5.000.000	5.000.000		
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				11.800.000		
	- Penggantian suku cadang	1	tahun	11.800.000	11.800.000		
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				3.294.464		
	- BBM Premium/Pertamax	1	LS	294.464	294.464		
	- Oli	1	tahun	3.000.000	3.000.000		
5 2 2 05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/Perpanjangan STNK				4.800.000		
	- Pajak/Perpanjang STNK Kendaraan Roda 2 x 2 Unit	2	unit/thn	400.000	800.000		
	- Pajak/Perpanjang STNK Kendaraan Roda 4 x 2 unit	2	unit/thn	2.000.000	4.000.000		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					25.894.464		
Triwulan I :							
Triwulan II :							
Triwulan III :							
Triwulan IV :							
Padang, 2019 An SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004							
TIM ANGGARAN							
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN			
1							
2							
3							
4							

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA- OPD 2.2.1			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.02.07					
PROVINSI SUMATERA BARAT								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi :	4	00	01	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	01	03	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
Kegiatan :	4	00	01	01	03	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat							
Sumber Dana :	APBD							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	1.750.000	-					
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	3.000.000	-					
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	3.600.000	-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA					
Capaian Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%					
Masukan	Jumlah dana		Rp. 3.000.000,-					
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum		9 unit (8 unit AC, 1 unit mesin ketik)					
Hasil	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				3.000.000			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3.000.000			
5 2 2 18	Belanja Pemeliharaan				3.000.000			
5 2 2 18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3.000.000			
	- Pemeliharaan AC	8	unit/tahun	350.000	2.800.000			
	- Pemeliharaan Mesin Tik	1	unit/tahun	200.000	200.000			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					3.000.000			
Triwulan I :		Padang, 2019						
Triwulan II :		An SEKRETARIS DAERAH						
Triwulan III :		ASISTEN PEMERINTAHAN						
Triwulan IV :		Ub. KEPALA BIRO HUKUM						
		 ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004						
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1								
2								
3								
4								

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-OPD 4.00.01.01.03.02.09		FORMULIR RKA - OPD 2.2.1
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintahan : 4 00 01 01 Organisasi : 4 00 01 01 03 Program : 4 00 01 01 03 02 Kegiatan : 4 00 01 01 03 02 09 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020 Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat Sumber Dana : APBD Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.300.000 ,- Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.000.000 ,- Jumlah Tahun 2021 : Rp. 3.600.000 ,-	Fungsi Lainnya Sekretariat Daerah (Biro Hukum) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA		
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%		
Masukan	Jumlah dana		Rp. 3.000.000 ,-		
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum		5 unit/ tahun (2 unit PC, 2 unit laptop, 1 unit printer)		
Hasil	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Setda					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				3.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				3.000.000
5 2 2 18	Belanja Pemeliharaan				3.000.000
5 2 2 18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3.000.000
	- Pemeliharaan/Servis PC/Komputer	2	unit/tahun	600.000	1.200.000
	- Pemeliharaan/Servis Note Book/Laptop	2	unit/tahun	650.000	1.300.000
	- Pemeliharaan/Servis Printer	1	unit/tahun	500.000	500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					3.000.000
Triwulan I :		Padang, 2019			
Triwulan II :		An SEKRETARIS DAERAH			
Triwulan III :		ASISTEN PEMERINTAHAN			
Triwulan IV :		Ub. KEPALA BIRO HUKUM			
		 ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004			
TIM ANGGARAN					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-SKPD 4.00.01.01.03.02.371		FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1	
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020					
Urusan Pemerintahan	: 4 00 01 01		Fungsi Lainnya			
Organisasi	: 4 00 01 01 03		Sekretariat Daerah (Biro Hukum)			
Program	: 4 00 01 01 03 02		Program Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur			
Kegiatan	: 4 00 01 01 03 02 371		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020					
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat					
Sumber Dana	: APBD					
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	7.000.000	,-			
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	40.000.000	,-			
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	48.000.000	,-			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA		
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			100%		
Masukan	Jumlah dana			Rp. 40.000.000 ,-		
Keluaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			3 unit (2 unit AC, 1 unit mesin fotokopi)		
Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum Sekretariat Daerah						
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah
1	2		Volume	Satuan	Hrg Satuan	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG					40.000.000
5 2 3	BELANJA MODAL					40.000.000
5 2 3 27	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</i>					40.000.000
5 2 3 27 05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya					40.000.000
		- AC	2	unit	10.000.000	20.000.000
		- Mesin Fotokopi	1	unit	20.000.000	20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						40.000.000
Triwulan I :			Padang, 2019			
Triwulan II :			An SEKRETARIS DAERAH			
Triwulan III :			ASISTEN PEMERINTAHAN			
Triwulan IV :			Ub. KEPALA BIRO HUKUM			
			 ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004			
TIM ANGGARAN						
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						
4						


SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA - OPD 2.2.1			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.04.01					
PROVINSI SUMATERA BARAT								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi :	4	00	01	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	01	03	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Kegiatan :	4	00	01	01	03	04	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat							
Sumber Dana :	APBD							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	74.312.000	.-					
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	162.353.422	.-					
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	194.824.106	.-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA					
Capaian Program	Meningkatnya kapasitas SDM/ aparatur		100%					
Masukan	Jumlah dana		Rp. 162.353.422 .-					
Keluaran	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur		1 tahun					
Hasil	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		10 jpl/org/tahun					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				162.353.422			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				162.353.422			
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				699.022			
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan) - BBM perjalanan dinas	1	LS	699.022	699.022			
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				60.254.400			
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dalam Daerah Dalam rangka mengikuti pendidikan/ bimbingan/pelatihan - Eselon III/IV (3 org X 3 hari X 1 Kali) Uang Penginapan Eselon III/IV (3 org X 2 hari X 1 Kali) - Staf Gol III/II (3 org X 3 hari X 2 Kali) Uang Penginapan Staf Gol III/II (3 org X 2 hari X 2 Kali)	9 6 18 12	OH OM OH OM	500.000 600.000 360.000 400.000	4.500.000 3.600.000 6.480.000 4.800.000			
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam rangka mengikuti pendidikan/ bimbingan/pelatihan - Eselon II/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 1 Kali) Uang Representasi Eselon II/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 1 Kali) Uang Penginapan Eselon II/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 1 Kali) Tiket + Airport Tax Taksi Lokal Padang (PP) Taksi Lokal Jakarta (PP) - Eselon III/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 1 Kali) Uang Penginapan Eselon III/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 1 Kali) Tiket + Airport Tax Taksi Lokal Padang (PP) Taksi Lokal Jakarta (PP) - Eselon IV/ Gol. III (1 org X 3 hari X 1 Kali) Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 1 Kali) Tiket + Airport Tax Taksi Lokal Padang (PP) Taksi Lokal Jakarta (PP)	3 3 2 1 2 2 6 4 2 4 4 6 4 1 2 2	OH OH OM OT OK OK OH OM OT OK OK OH OM OT OK OK	1.200.000 400.000 1.450.000 3.542.400 190.000 256.000 900.000 992.000 2.952.000 190.000 256.000 900.000 610.000 2.952.000 190.000 256.000	3.600.000 1.200.000 2.900.000 3.542.400 380.000 512.000 5.400.000 3.968.000 5.904.000 760.000 1.024.000 5.400.000 2.440.000 2.952.000 380.000 512.000			
5 2 2 30	Belanja Kontribusi				101.400.000			
5 2 2 30 01	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang - Perencanaan Anggaran/Keu/Brg Jasa/ lainnya (2 org) - Bintek Advokasi/ Kuasa Hukum (2 org) - Bintek Penyusun Perancang Peraturan Per- UU (2 org)	2 2 2	OK OK OK	4.700.000 6.000.000 40.000.000	9.400.000 12.000.000 80.000.000			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					162.353.422			
Triwulan I	Padang, 2019							
Triwulan II	An SEKRETARIS DAERAH							
Triwulan III	ASISTEN PEMERINTAHAN							
Triwulan IV	Ub. KEPALA BIRO HUKUM							
								
	ENIFITA DJINIS, SH							
	Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004							
TIM ANGGARAN								
1								
2								
3								
4								

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA- OPD 2.2.1
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.05.01		
PROVINSI SUMATERA BARAT					
TAHUN ANGGARAN 2020					
Urusan Pemerintahan	4	00	01	01	Fungsi Lainnya
Organisasi	4	00	01	01	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
Program	4	00	01	01	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
Kegiatan	4	00	01	01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020				
Lokasi Kegiatan	: Biro Hukum				
Sumber Dana	: APBD				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	8.070.500 ,-			
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	5.000.000 ,-			
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	6.000.000 ,-			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA		
Capaian Program	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan		100%		
Masukan	Jumlah dana		Rp. 5.000.000 ,-		
Keluaran	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD		12 bulan		
Hasil	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum Setda					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				5.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				5.000.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				330.000
	- Kertas HVS Folio	5	rim	51.500	257.500
	- Pena my gell	1	kotak	72.500	72.500
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				1.765.000
	- Catridge Printer	3	ktk	255.000	765.000
	- Toner 35 A	1	unit	1.000.000	1.000.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.905.000
5 2 2 06 02	- Belanja penggandaan	9.620	lembar	250	2.405.000
	- Belanja penjilidan	50	eks	10.000	500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					5.000.000
Triwulan I	:				
Triwulan II	:				
Triwulan III	:				
Triwulan IV	:				
Padang, 2019 An SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM					
					
ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004					
TIM ANGGARAN					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					



SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA-OPD 2.2.1
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.05.02		
PROVINSI SUMATERA BARAT					
TAHUN ANGGARAN 2020					
Urusan Pemerintahan	: 4	00	01	01	Fungsi Lainnya
Organisasi	: 4	00	01	01	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
Program	: 4	00	01	01	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
Kegiatan	: 4	00	01	01	Penatausahaan keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020				
Lokasi Kegiatan	: Biro Hukum				
Sumber Dana	: APBD				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	129.989.100	.-		
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	110.325.393	.-		
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	132.390.472	.-		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA		
Capaian Program	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan		100%		
Masukan	Jumlah dana		Rp. 110.325.393 .-		
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD		12 bln		
Hasil	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum Setda					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung					
Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				110.325.393
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				110.325.393
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				11.503.393
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.724.200
	- Kertas HVS Folio	20	rim	51.500	1.030.000
	- Kertas HVS Kwarto/A4	5	rim	49.600	248.000
	- Spidol permanen	12	buah	9.700	116.400
	- Pena My gell	6	kotak	72.500	435.000
	- Tip ex 30 ml	6	kotak	16.000	96.000
	- Pensil	2	lusin	58.000	116.000
	- Map Klip /Scnelcheter map	300	buah	7.300	2.190.000
	- Ordner Karton	12	bh	27.800	333.600
	- Ordner Plastik	24	bh	48.300	1.159.200
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				600.993
	- BBM perjalanan dinas	1	LS	600.993	600.993
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis				5.178.200
	- Binder Klip kecil	12	kotak	8.500	102.000
	- Binder Klip sedang	24	kotak	10.300	247.200
	- Binder Klip besar	24	kotak	12.100	290.400
	- Isi Hecter kecil	12	kotak	17.000	204.000
	- Isi Hecter 10	6	kotak	26.500	159.000
	- Hecter (Stapler) kecil	6	buah	23.600	141.600
	- Hecter (Stapler) besar	2	buah	72.450	144.900
	- Flash disk	1	buah	100.100	100.100
	- CD/DVD R/RW	12	buah	10.000	120.000
	- Toner printer 35A	2	ktk	1.000.000	2.000.000
	- Catridge Printer	6	ktk	255.000	1.530.000
	- Pelobang Kertas Merk Kenko No.85	2	bh	69.500	139.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.070.000
5 2 2 06 02	- Belanja penggandaan	7.800	lembar	250	1.950.000
	- Belanja penjilidan	12	eks	10.000	120.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				25.352.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dalam Daerah				5.440.000
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 4 Kali)	8	OH	500.000	4.000.000
	- Staf Gol III/II (1 org X 1 hari X 4 Kali)	4	OH	360.000	1.440.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				19.912.000
	Dalam rangka mengikuti study banding WTP Keuangan				
	- Eselon IV/ Gol. III (1 org X 3 hari X 1 Kali)	3	OH	900.000	2.700.000
	Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. IV (1 org X 2 mlm X 1 Kl)	2	OM	910.000	1.820.000
	Tiket + Airport Tax	1	OT	4.888.000	4.888.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	2	OK	190.000	380.000
	Taksi Lokal Denpasar (PP)	2	OK	159.000	318.000
	- Staf / Gol. III/II (1 org X 3 hari X 1 Kali)	3	OH	800.000	2.400.000
	Uang Penginapan Staf/ Gol. III/II (1 org X 2 mlm X 1 Kali)	2	OM	910.000	1.820.000
	Tiket + Airport Tax	1	OT	4.888.000	4.888.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	2	OK	190.000	380.000
	Taksi Lokal Denpasar (PP)	2	OK	159.000	318.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2 2 26	Honorarium PNS				71.400.000
5 2 2 26 04	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah				41.400.000
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	12	Bulan	650.000	7.800.000
	- Honor PPTK (5 org x 12 bln)				
	- Bagian Perundang-undangan	12	Bulan	550.000	6.600.000
	- Bagian Bina Produk Hukum Kab/Kota	12	Bulan	550.000	6.600.000
	- Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM	12	Bulan	550.000	6.600.000
	- Sub bagian Tata Usaha	12	Bulan	550.000	6.600.000
	- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	Bulan	600.000	7.200.000
5 2 2 26 08	Honorarium Pengelola SIPKD				24.000.000
	- Operator Anggaran (2 org)	24	Bulan	500.000	12.000.000
	- Operator Penatausahaan Keuangan (1 org)	12	Bulan	500.000	6.000.000
	- Operator Pertanggungjawaban Keuangan (1 org)	12	Bulan	500.000	6.000.000
5 2 2 26 37	Honorarium Pengelola SIMBANGDA				6.000.000
	- Operator Simbangda (1 org)	12	Bulan	500.000	6.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					110.325.393

Triwulan I : _____
 Triwulan II : _____
 Triwulan III : _____
 Triwulan IV : _____

Padang, 2019
 An SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 Ub. KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH
 Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004

TIM ANGGARAN				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA- OPD 2.2.1			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.05.03					
PROVINSI SUMATERA BARAT								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi :	4	00	01	01	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)			
Program :	4	00	01	01	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan			
Kegiatan :	4	00	01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Biro Hukum							
Sumber Dana :	APBD							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	8.280.000	,-					
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	7.000.000	,-					
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	8.400.000	,-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan			100%				
Masukan	Jumlah dana			Rp. 7.000.000 ,-				
Keluaran	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD			12 bln				
Hasil	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD			100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian				Rincian Perhitungan			Jumlah
					Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2				3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG							7.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA							7.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis							1.040.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor							330.000
	- Kertas HVS Folio				5	rim	51.500	257.500
	- Pena My gell				1	kotak	72.500	72.500
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis							710.000
	- Catridge printer				2	ktk	255.000	510.000
	- CD-RW/ DVD-RW				20	buah	10.000	200.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan							1.160.000
5 2 2 06 02	- Belanja penggandaan				2.640	lembar	250	660.000
	- Belanja penjiplidan				50	eks	10.000	500.000
5 2 2 26	Honorarium PNS							4.800.000
5 2 2 26 27	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD							4.800.000
	- Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD				12	Bulan	400.000	4.800.000
7.000.000								
Triwulan I :					Padang, 2019			
Triwulan II :					An SEKRETARIS DAERAH			
Triwulan III :					ASISTEN PEMERINTAHAN			
Triwulan IV :					Ub. KEPALA BIRO HUKUM			
								
					ENIFITA DJINIS, SH			
					Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004			
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP		JABATAN	TANDA TANGAN			
1								
2								
3								
4								


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR RKA-OPD 2.2.1			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.05.19					
PROVINSI SUMATERA BARAT								
TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan :	4	00	01	01	Fungsi Lainnya			
Organisasi :	4	00	01	01	03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program :	4	00	01	01	03	05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	
Kegiatan :	4	00	01	01	03	05	19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Biro Hukum							
Sumber Dana :	APBD							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	58.858.500 ,-						
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	30.000.000 ,-						
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	36.000.000 ,-						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA				
Capaian Program	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			100%				
Masukan	Jumlah dana			Rp. 30.000.000 ,-				
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD			12 bln				
Hasil	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan: Biro Hukum Setda								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah		
1	2		Volume	Satuan	Hrg Satuan	6 = 3 X 5		
5 2	BELANJA LANGSUNG					30.000.000		
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA					30.000.000		
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis					2.627.500		
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor					587.500		
		- Kertas HVS Follio	10	rim	51.500	515.000		
		- Pena my gell	1	kotak	72.500	72.500		
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/pertengkapan pakai habis					2.040.000		
		- Catridge printer	8	ktk	255.000	2.040.000		
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan					1.572.500		
5 2 2 06 02	- Belanja penggandaan		6.290	lembar	250	1.572.500		
5 2 1 27	Honorarium PNS					25.800.000		
5 2 1 27 05	Honorarium Pengelola Asset Daerah					25.800.000		
		- Honor Pejabat Pengadaan	12	Bulan	400.000	4.800.000		
		- Honor Penerima Hasil Pekerjaan	12	Bulan	250.000	3.000.000		
		- Honor Pengurus Barang	12	Bulan	450.000	5.400.000		
		- Honor Pejabat Penatausahaan Barang	12	Bulan	550.000	6.600.000		
		- Honor Operator Aset	12	Bulan	500.000	6.000.000		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						30.000.000		
Triwulan I :								
Triwulan II :								
Triwulan III :								
Triwulan IV :	22.000.000							
Padang, 2019								
An SEKRETARIS DAERAH								
ASISTEN PEMERINTAHAN								
Ub. KEPALA BIRO HUKUM								
								
ENIFITA DJINIS, SH								
Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004								
TIM ANGGARAN								
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN				
1								
2								
3								
4								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Saluran	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6=3X5
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				558.944.400
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				30.650.000
	Dalam rangka pembahasan Ranperda/monitoring pelaksanaan Perda Provinsi di Kab./Kota				
	- Eselon II (1 org x 1 hari x 15 kali)	15	OH	500.000	7.500.000
	Representasi Eselon II	15	OH	250.000	3.750.000
	- Eselon III/IV (2 org x 1 hari x 14 kali)	28	OH	500.000	14.000.000
	- Staf gol III/III/Sopir (1 org x 1 hari x 15 kali)	15	OH	360.000	5.400.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				528.294.400
	a. Dalam rangka pendalaman dan pembahasan materi Ranperda ke Wilayah Indonesia				274.401.600
	- Eselon II (1 org x 3 hr x 6 kl)	18	OH	1.200.000	21.600.000
	Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 6 kl)	18	OH	400.000	7.200.000
	Uang penginapan eselon II (1 org x 2 hr x 6 kl)	12	OM	1.946.000	23.352.000
	Tiket + airport tax (Pdg-Bali/PP) (1 org x 6 kl)	6	OK	5.865.600	35.193.600
	Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 6 kl)	12	OK	190.000	2.280.000
	Taksi lokal Denpasar (1 org x 2 x 6 kl)	12	OK	159.000	1.908.000
	- Eselon III/ Gol IV (1 org x 3 hr x 6 kl)	18	OH	900.000	16.200.000
	Uang penginapan eselon III/IV (1 org x 2 hr x 6 kl)	12	OM	990.000	11.880.000
	Tiket + airport tax (Pdg-Bali/PP) (1 org x 6 kl)	6	OT	4.888.000	29.328.000
	Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 6 kl)	12	OK	190.000	2.280.000
	Taksi lokal Denpasar (1 org x 2 x 6 kl)	12	OK	159.000	1.908.000
	- Eselon IV/ Gol III (2 org x 3 hr x 6 kl)	36	OH	900.000	32.400.000
	Uang penginapan eselon IV/III (2 org x 2 hr x 6 kl)	24	OM	910.000	21.840.000
	Tiket + airport tax (Pdg-Bali/PP) (2 org x 6 kl)	12	OT	4.888.000	58.656.000
	Taksi lokal Padang (2 org x 2 x 6 kl)	24	OK	190.000	4.560.000
	Taksi lokal Denpasar (2 org x 2 x 6 kl)	24	OK	159.000	3.816.000
	b. Konsultasi Ranperda dan produk hukum lainnya ke Kemendagri dan Kementerian terkait				253.892.800
	- Eselon II (1 org x 3 hr x 7 kl)	21	OH	1.200.000	25.200.000
	Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 7 kl)	21	OH	400.000	8.400.000
	Uang penginapan eselon II (1 org x 2 hr x 7 kl)	14	OM	1.490.000	20.860.000
	Tiket + airport tax (Pdg-Jkt, 1 org x 7 kl)	7	OT	3.542.400	24.796.800
	Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 7 kl)	14	OK	190.000	2.660.000
	Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 7 kl)	14	OK	256.000	3.584.000
	- Eselon III/Gol IV (1 org x 3 hr x 7 kl)	21	OH	900.000	18.900.000
	Uang penginapan eselon III/Gol IV (1 org x 2 hr x 7 kl)	14	OM	992.000	13.888.000
	Tiket + airport tax (Pdg-Jkt, 1 org x 7 kl)	7	OT	2.952.000	20.664.000
	Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 7 kl)	14	OK	190.000	2.660.000
	Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 7 kl)	14	OK	256.000	3.584.000
	- Eselon IV/Gol III (2 org x 3 hr x 7 kl)	42	OH	900.000	37.800.000
	Uang penginapan eselon IV/Gol III (2 org x 2 hr x 7 kl)	28	OM	610.000	17.080.000
	Tiket + airport tax (Pdg-Jkt, 2 org x 7 kl)	14	OT	2.952.000	41.328.000
	Taksi lokal Padang (2 org x 2 x 7 kl)	28	OK	190.000	5.320.000
	Taksi lokal Jakarta (2 org x 2 x 7 kl)	28	OK	256.000	7.168.000
5 2 2 26	Belanja Honorarium PNS				4.500.000
5 2 2 26 003	Belanja Jasa Narasumber				4.500.000
	- Narasumber Daerah (Eselon II, 1 Orang x 2 jam)	2	OJ	750.000	1.500.000
	- Narasumber Daerah (Eselon III, 1 Orang x 2 jam)	2	OJ	500.000	1.000.000
	- Narasumber Pusat (Eselon II, 1 Orang x 2 jam)	2	OJ	1.000.000	2.000.000
5 2 2 27	Belanja Honorarium Non PNS				1.800.000
5 2 2 27 022	Belanja Jasa Moderator	3	O/KP	500.000	1.500.000
5 2 2 27 033	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	O/KP	150.000	150.000
5 2 2 27 34	Belanja Jasa Pembaca Doa	1	O/KP	150.000	150.000
5 2 2 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				157.500.000
5 2 2 33 01	Belanja Vakasi				157.500.000
	- Rapat pembahasan produk hukum provinsi (21 org x 50 kl)	1.050	OH	150.000	157.500.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

866.151.756

Triwulan I :
 Triwulan II :
 Triwulan III :
 Triwulan IV : _____

Padang, 2019
 An. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 Ub. KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH
 Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004


Keterangan
 Tanggal Pembahasan
 Catatan Hasil Pembahasan

1
 2


TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH



NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				



INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA		
	Capaian Program	Terwujudnya pembangunan materi hukum		100%	
Masukan	Jumlah dana		Rp. 155.000.000,-		
Keluaran	Tertaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional		15 Perda, 60 Pergub 750 Konsep Keputusan Gubernur		
Hasil	Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD lingkup provinsi					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				155.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				155.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.156.200
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.895.000
	- Kertas HVS folio	30	rim	51.500	1.545.000
	- Pena my gell	3	kotak	72.500	217.500
	- Pensil	1	lusin	58.000	58.000
	- Karet Penghapus	1	lusin	36.500	36.500
	- Tip Ex	6	kotak	16.000	96.000
	- Ordner File Plastik	12	buah	48.300	579.600
	- Box File Karton	12	buah	30.200	362.400
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				830.400
	- BBM	1	LS	830.400	830.400
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis				3.430.800
	- Pelobang Kertas Merk Kenko No.85	1	bh	69.500	69.500
	- Binder Klip kecil	12	kotak	8.500	102.000
	- Binder Klip sedang	12	kotak	10.300	123.600
	- Binder Klip besar	12	kotak	12.100	145.200
	- Isi Hecter kecil	6	kotak	17.000	102.000
	- Isi Hecter besar	1	kotak	26.500	26.500
	- Hecter (Stapler)	3	buah	23.600	70.800
	- Klip paper	6	kotak	30.200	181.200
	- Flashdisk	1	bh	100.000	100.000
	- Catridge Tinta	2	buah	255.000	510.000
	- Toner Printer 85A	2	buah	1.000.000	2.000.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.175.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				
	- Belanja penggandaan bahan Rapat	8.700	lbr	250	2.175.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				8.820.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.820.000
	- Snack rapat (21 org x 20 kl)	420	kotak	21.000	8.820.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				73.848.800
5 2 2 15 01	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				24.600.000
	- Eselon II (1 org x 1 hari x 12 kali)	12	OH	500.000	6.000.000
	Representasi Eselon II	12	OH	250.000	3.000.000
	- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 12 kl)	24	OH	500.000	12.000.000
	- Staf Gol III/IV/Sopir (1 org x 1 hr x 10 kl)	10	OH	360.000	3.600.000


Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
							Volume	Saluran	Hrg Satuan	
1						2	3	4	5	6 = 3 X 5
5	2	2	15	02		- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				49.248.800
						- Konsultasi dan koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum ke Kemendagri dan Kementerian terkait				
						- Eselon II (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	1.200.000	7.200.000
						Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	400.000	2.400.000
						Uang penginapan eselon II (1 org x 2 hr x 2 kl)	4	OM	1.490.000	5.960.000
						Tiket +airport tax	2	OT	3.542.400	7.084.800
						Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	190.000	760.000
						Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
						- Eselon III/Gol IV (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	900.000	5.400.000
						Uang penginapan eselon III/Gol IV (1 org x 2 hr x 2 kl)	4	OM	992.000	3.968.000
						Tiket +airport tax	2	OT	2.952.000	5.904.000
						Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	190.000	760.000
						Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
						- Eselon IV/Gol III (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	900.000	2.700.000
						Uang penginapan eselon IV/Gol III (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	610.000	1.220.000
						Tiket +airport tax	1	OT	2.952.000	2.952.000
						Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	190.000	380.000
						Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	256.000	512.000
5	2	1	33			Belanja Vaksin/Verifikasi				63.000.000
5	2	1	33	01		Belanja Vaksin				63.000.000
						- Pembahasan Ranperda, Ranpergub, dan Peraturan Per-uu (21 org x 20 kl)	420	OH	150.000	63.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG										155.000.000
Keterangan						Padang, 2019 An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004				
Triwulan I :										
Triwulan II :										
Triwulan III :										
Triwulan IV :										
Tanggag Pembahasan										
Catatan Hasil Pembahasan										
1										
2										
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH										
NO	NAMA					NIP	JABATAN			TANDA TANGAN
1										
2										
3										
4										


SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA ANGGARAN		NOMOR RKA-OPD		FORMULIR			
	UNIT KERJA		4.00.01.01.03.224.03		RKA-OPD			
	PROVINSI SUMATERA BARAT				2.2.1			
TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintah :	4	00	01	01			Fungsi Lainnya	
Organisasi :	4	00	01	01	03		Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	
Program :	4	00	01	01	03	224	Program Pembangunan Materi Hukum	
Kegiatan :	4	00	01	01	03	224	03	Penyusunan Propem Perda Provinsi
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020							
Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat							
Sumber Dana :	APBD							
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	79.274.400					-	
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	130.000.000					-	
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	156.000.000					-	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA				
Capaian Program	Terwujudnya pembangunan materi hukum			100%				
Masukan	Jumlah dana			Rp. 130.000.000 ,-				
Keluaran	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi dan rencana pembentukan Perda di luar program pembentukan Perda			15 Ranperda pada Daftar Propem Perda				
Hasil	Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum			100%				
Kelompok Sasaran Kegiatan :	OPD lingkup provinsi							
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Hrg Satuan				
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5			
5 2	BELANJA LANGSUNG				130.000.000			
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				130.000.000			
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.740.200			
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.321.500			
	- Kertas HVS folio	10	rim	51.500	515.000			
	- Pena my gell	2	kotak	72.500	145.000			
	- Pensil	1	lusin	58.000	58.000			
	- Karet Penghapus	1	lusin	36.500	36.500			
	- Tip Ex	6	kotak	16.000	96.000			
	- Ordner File Plastik	6	buah	48.300	289.800			
	- Box File Karton	6	buah	30.200	181.200			
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				396.400			
	- BBM	1	LS	396.400	396.400			
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis				3.522.300			
	- Binder Klip kecil	3	kotak	8.500	25.500			
	- Binder Klip sedang	3	kotak	10.300	30.900			
	- Binder Klip besar	3	kotak	12.100	36.300			
	- Isi Hecter kecil	12	kotak	17.000	204.000			
	- Isi Hecter besar	1	kotak	26.500	26.500			
	- Hecter (Stapler) besar	1	buah	73.700	73.700			
	- Klip paper	2	kotak	30.200	60.400			
	- Toner printer 85A	2	kotak	1.000.000	2.000.000			
	- Catridge Tinta Printer	3	bh	255.000	765.000			
	- Spanduk kegiatan (5 M x 1 buah)	5	meter	60.000	300.000			
5 2 2 01 16	Belanja Seminar Kit Peserta				2.500.000			
	- Seminar Kit Peserta	50	orang	50.000	2.500.000			
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				4.542.400			
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Akomodasi							
	- Narasumber Pusat	1	OM	1.000.000	1.000.000			
5 2 2 03 20	Belanja Transportasi							
	- Narasumber Pusat (1 org)	1	OT	3.542.400	3.542.400			
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.125.000			
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2.125.000			
	- Belanja penggandaan bahan Rapat	4.500	lbr	250	1.125.000			
	- Belanja penggandaan bahan Rakor	4.000	lbr	250	1.000.000			
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000			
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				1.000.000			
	- Sewa ruang rapat/pertemuan	1	kali	1.000.000	1.000.000			
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				5.484.000			
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				1.764.000			
	- Pembahasan prolegda (21 org x 4 kl)	84	kotak	21.000	1.764.000			
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				3.720.000			
	- Nasi Kotak 2 protein (60 org)	60	kotak	41.000	2.460.000			
	- Snack (60 org x 1 kali)	60	kotak	21.000	1.260.000			
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				91.708.400			
5 2 2 15 01	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12.660.000			
	Dalam rangka perbandingan propem Perda							
	- Eselon II (1 org x 1 hari x 6 kali)	6	OH	500.000	3.000.000			
	Representasi Eselon II	6	OH	250.000	1.500.000			
	- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 6 kali)	12	OH	500.000	6.000.000			
	- Staf Gol III/II/Sopir (1 org x 1 hr x 6 kali)	6	OH	360.000	2.160.000			

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6=3X5
						Volume	Saluan	Hrg Saluan	
1	2	3	4	5	3	4	5	6=3X5	
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				79,048,400
5	2	2	15	02	a. Dalam rangka penyusunan Propem Perda ke Wilayah Indonesia				35,627,600
					- Eselon II (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	1.200.000	3.600.000
					Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	400.000	1.200.000
					Uang penginapan eselon II (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	1.946.000	3.892.000
					Tiket +airport tax (1 org x 1 kali)	1	OT	5.865.600	5.865.600
					Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	190.000	380.000
					Taksi lokal Denpasar (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	159.000	318.000
					- Eselon III/ Gol IV (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	900.000	2.700.000
					Uang penginapan eselon III/ Gol IV (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	990.000	1.980.000
					Tiket +airport tax (1 org x 1 kali)	1	OT	4.888.000	4.888.000
					Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	190.000	380.000
					Taksi lokal Denpasar (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	159.000	318.000
					- Eselon IV/ Gol III (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	900.000	2.700.000
					Uang penginapan eselon IV/Gol III (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	910.000	1.820.000
					Tiket +airport tax (1 org x 1 kali)	1	OT	4.888.000	4.888.000
					Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	190.000	380.000
					Taksi lokal Denpasar (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	159.000	318.000
					b. Konsultasi penyusunan Propem Perda ke Kemendagri dan Kementerian terkait				43.420,800
					- Eselon II (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	1.200.000	7.200.000
					Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	400.000	2.400.000
					Uang penginapan eselon II (1 org x 2 hr x 2 kl)	4	OM	1.490.000	5.960.000
					Tiket +airport tax	2	OT	3.542.400	7.084.800
					Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	190.000	760.000
					Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
					- Eselon III/Gol IV (1 org x 3 hr x 1 kl)	6	OH	900.000	5.400.000
					Uang penginapan eselon III/Gol IV (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	992.000	1.984.000
					Tiket +airport tax	1	OT	2.952.000	2.952.000
					Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	190.000	380.000
					Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	256.000	512.000
					- Eselon IV/Gol III (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	900.000	2.700.000
					Uang penginapan eselon IV/Gol III (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	610.000	1.220.000
					Tiket +airport tax	1	OT	2.952.000	2.952.000
					Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	190.000	380.000
					Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 1 kl)	2	OK	256.000	512.000
5	2	2	26		Honorarium PNS				3.500.000
5	2	2	26	003	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber				
					- Narasumber Daerah (Eselon II, 1 Orang x 2 jam)	2	OJ	750.000	1.500.000
					- Narasumber Pusat (Eselon II, 1 Orang x 2 jam)	2	OJ	1.000.000	2.000.000
5	2	2	27		Honorarium Non PNS				1.300.000
5	2	2	27	022	Belanja Jasa Moderator	2	O/KP	500.000	1.000.000
5	2	2	27	033	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	O/KP	150.000	150.000
5	2	2	27	034	Belanja Jasa Pembaca Doa	1	O/KP	150.000	150.000
5	2	1	33		Belanja Vaksin/Verifikasi				12.600.000
5	2	1	33	01	Belanja Vaksin				12.600.000
					- Pembahasan rencana propem Perda (21 org x 4 kl)	84	OH	150.000	12.600.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									130.000.000
Triwulan I : Triwulan II : Triwulan III : Triwulan IV :					Padang, 2019 An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004				
Keterangan									
Tanggal Pembahasan									
Catatan Hasil Pembahasan									
1									
2									
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH									
NO	NAMA				NIP	JABATAN		TANDA TANGAN	
1									
2									
3									
4									

	RENCANA KERJA ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-OPD 4.00.01.01.03.224.05		FORMULIR RKA-OPD 2.2.1
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintah : Organisasi : Program : Kegiatan :	4 00 01 01 4 00 01 01 03 4 00 01 01 03 224 4 00 01 01 03 224 05	Fungsi Lainnya Sekretariat Daerah (Biro Hukum) Program Pembangunan Materi Hukum Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah			
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :	Januari s/d Desember 2020 Sumatera Barat APBD				
Jumlah Tahun 2019 : Jumlah Tahun 2020 : Jumlah Tahun 2021 :	Rp. 80.288.000 - Rp. 100.000.000 - Rp. 120.000.000 -				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
Capaian Program	Terwujudnya pembangunan materi hukum			100%	
Masukan	Jumlah dana			Rp. 100.000.000 -	
Keluaran	Terlaksananya proses evaluasi dan klarifikasi produk hukum daerah			- 15 Perda - 60 Pergub	
Hasil	Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Biro Hukum dan OPD terkait				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				100.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				100.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.848.950
5 2 2 01 01	Belanja ATK				678.150
	- Kertas HVS Folio	12	rim	51.500	618.000
	- Kertas Pembungkus Surat/Kacang	6	lembar	5.000	30.000
	- Amplop Coklat Besar (super PKB, 12 x Rp. 2.500,-)	1	lusin	30.150	30.150
5 2 2 27 01	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				4.170.800
	- Catridge tinta	4	kotak	255.000	1.020.000
	- Toner printer 85A	3	kotak	1.000.000	3.000.000
	- Lem kertas besar	2	botol	19.000	38.000
	- Isolasi bening	6	rol	18.800	112.800
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.682.250
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				7.682.250
	- Penggandaan	20.529	lbr	250	5.132.250
	- Penjilidan bahan evaluasi & klarifikasi Pergub/ Perda	85	kulit	30.000	2.550.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				87.468.800
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah				87.468.800
	Dalam rangka evaluasi dan klarifikasi Perda Provinsi dan Pergub ke Kemendagri				
	- Eselon II/Gol IV (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	1.200.000	7.200.000
	Uang representasi eselon II/Gol IV (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	400.000	2.400.000
	Uang penginapan eselon II/Gol IV (1 org x 2 hr x 2 kl)	4	OM	1.490.000	5.960.000
	Tiket +airport tax	2	OT	3.542.400	7.084.800
	Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
	- Eselon III/Gol IV (1 org x 3 hr x 2 kl)	6	OH	900.000	5.400.000
	Uang penginapan eselon III/Gol IV (1 org x 2 hr x 2 kl)	4	OM	992.000	3.968.000
	Tiket +airport tax	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi lokal Padang (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi lokal Jakarta (1 org x 2 x 2 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
	- Eselon IV/Gol III (2 org x 3 hr x 2 kl)	12	OH	900.000	10.800.000
	Uang penginapan eselon IV/Gol III (2 org x 2 hr x 2 kl)	8	OM	610.000	4.880.000
	Tiket +airport tax	4	OT	2.952.000	11.808.000
	Taksi lokal Padang (2 org x 2 x 2 kl)	8	OK	190.000	1.520.000
	Taksi lokal Jakarta (2 org x 2 x 2 kl)	8	OK	256.000	2.048.000
	- Staf Gol III/II (2 org x 3 hr x 1 kl)	6	OH	800.000	4.800.000
	Uang penginapan eselon IV/Gol III (2 org x 2 hr x 1 kl)	4	OM	610.000	2.440.000
	Tiket +airport tax	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi lokal Padang (2 org x 2 x 1 kl)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi lokal Jakarta (2 org x 2 x 1 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					100.000.000
Triwulan I :	18.276.300				
Triwulan II :	13.151.800				
Triwulan III :	26.554.400				
Triwulan IV :	10.800.000				
	<u>68.882.500</u>				
		Padang, 2019 An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004			
Keterangan Tanda/Pengesahan:					
1					
2					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA-TANGAN	
1					
2					
3					
4					

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020			RKA- OPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan	4 00 01 01				Fungsi Lainnya	
Organisasi	4 00 01 01 03				Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	
Program	4 00 01 01 03 225				Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	
Kegiatan	4 00 01 01 03 225 01				Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020					
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat					
Alokasi Dana	: APBD					
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 56.550.000,-					
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 120.000.000,-					
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 144.000.000,-					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA		
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM			100%		
Masukan	Tersedianya Dana Pendukung			Rp. 120.000.000,-		
Keluaran	Terlaksananya fasilitasi pemberian advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan			12 Perkara		
Hasil	Persentase bantuan advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan			100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan						
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Hrg Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5	
5 2	BELANJA LANGSUNG				120.000.000	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				120.000.000	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.180.000	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.975.700	
	- Kertas HVS Folio	30	rim	51.500	1.545.000	
	- Pena my gell	3	kotak	72.500	217.500	
	- Ordner File Plastik	12	buah	48.300	579.600	
	- Map Snelhecter bufallo	24	buah	7.300	175.200	
	- Tip Ex	6	kotak	16.000	96.000	
	- Box file karton	12	buah	30.200	362.400	
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos				750.000	
	- Materai Rp. 3.000,-	50	lembar	3.000	150.000	
	- Materai Rp. 6.000,-	100	lembar	6.000	600.000	
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas digunakan langsung untuk kegiatan)				658.450	
	- BBM	1	LS	658.450	658.450	
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				5.795.850	
	- Pelobang kertas merk kenko no. 85	1	buah	69.500	69.500	
	- Catridge Printer	12	buah	255.000	3.060.000	
	- Toner Laser Printer	2	buah	1.000.000	2.000.000	
	- Klip paper trigonal	3	kotak	30.200	90.600	
	- Binder klip 107	12	kotak	8.500	102.000	
	- Binder klip 111	12	kotak	10.300	123.600	
	- Isi Hecter besar	1	kotak	26.500	26.500	
	- Isi Hecter kecil	12	kotak	17.000	204.000	
	- Stapler Besar	1	buah	72.450	72.450	
	- Stapler (Hecter)	2	buah	23.600	47.200	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.500.000	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3.500.000	
	- Penggandaan	13.200	lembar	250	3.300.000	
	- Penjilidan	20	eks	10.000	200.000	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				16.320.000	
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				16.320.000	
	Dalam rangka monitoring pelaksanaan bantuan advokasi hukum					
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 12 Kali)	24	OH	500.000	12.000.000	
	- Staf Gol III/III/Sopir (1 org X 1 hari X 12 Kali)	12	OH	360.000	4.320.000	
5 2 2 24	Belanja Jasa Lembaga				90.000.000	
5 2 2 24 006	Belanja Jasa Advokasi/Pengacara==pengadilan				90.000.000	
	- Bantuan advokasi bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di pengadilan yang disalurkan melalui jasa pengacara	12	perkara	7.500.000	90.000.000	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					120.000.000	
Triwulan I	:					
Triwulan II	:					
Triwulan III	:					
Triwulan IV	:					
				Padang, 2019 An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN			RKA- OPD 2.2.1
		UNIT KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019			
Urusan Pemerintahan	4 00 01 01			Fungsi Lainnya	
Organisasi	4 00 01 01 03			Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	
Program	4 00 01 01 03 225			Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	
Kegiatan	4 00 01 01 03 225 02			Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kabupaten/Kota	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020				
Alokasi Dana	: APBD				
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	38,124,400	,-		
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	78,966,185	,-		
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	94,759,422	,-		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM			100%	
Masukan	Tersedianya dana pendukung			Rp. 78.966.185 ,-	
Keluaran	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum			5 kasus	
Hasil	Persentase rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum di lingkup Provinsi, dan Kab./Kota			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur OPD Provinsi dan Kab./Kota					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = 3 X 5
		Volume 3	Satuan 4	Hrg Satuan 5	
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA LANGSUNG				78.966.185
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				78.966.185
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.970.785
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1,526,200
	- Kertas HVS Folio	10	rim	51,500	515,000
	- Ordner File Plastik	6	buah	48,300	289,800
	- Pena my gell	3	kotak	72,500	217,500
	- Klip Paper trigonal	6	kotak	30,200	181,200
	- Box file karton	6	buah	30,200	181,200
	- Tip Ex	2	kotak	16,000	32,000
	- Map snelhecter	15	buah	7,300	109,500
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas digunakan langsung untuk kegiatan)				529,585
	- BBM	1	LS	529,585	529,585
5 2 2 01 16	Belanja Seminar Kit Peserta				3,750,000
	- Seminar kit peserta	75	orang	50,000	3,750,000
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				2,165,000
	- Toner Printer 85A	1	kotak	1,000,000	1,000,000
	- Catridge tinta printer	3	kotak	255,000	765,000
	- Flashdisk	1	buah	100,000	100,000
	- Spanduk Kegiatan (5 m x 2 Buah)	5	meter	60,000	300,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				4.542.400
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Akomodasi				1,000,000
	- Narasumber Pusat	1	OM	1,000,000	1,000,000
5 2 2 03 20	Belanja Transportasi				3,542,400
	- Pengganti transport Narasumber Pusat	1	OT	3,542,400	3,542,400
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.294.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2,294,000
	- Penggandaan bahan rapat	5,176	lembar	250	1,294,000
	- Penggandaan bahan rakor	4,000	lembar	250	1,000,000
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				1,000,000
	- Sewa ruang rapat/pertemuan	1	kali	1,000,000	1,000,000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				6.225.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,575,000
	- Snack Rapat (5 Kl X 15 Orang)	75	kotak	21,000	1,575,000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4,650,000
	- Nasi Kotak 2 protein (75 org)	75	kotak	41,000	3,075,000
	- Snack (75 org)	75	kotak	21,000	1,575,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				39.384.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				6,800,000
	Dalam rangka sosialisasi dan pemantauan penyelesaian permasalahan hukum di Provinsi dan Kab./Kota				
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 5 Kali)	10	OH	500,000	5,000,000
	- Staf Gol III/III/Sopir (1 org X 1 hari X 5 Kali)	5	OH	360,000	1,800,000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam rangka Rakor dan konsultasi permasalahan hukum				32.584.000
	- Eselon III/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	900.000	5.400.000
	Uang Penginapan Eselon III/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 2 Kali)	4	OM	992.000	3.968.000
	Tiket + airport tax	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	4	OK	256.000	1.024.000
	- Eselon IV/ Gol. III (1 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	900.000	5.400.000
	Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. III (1 org X 2 hari X 2 Kali)	4	OM	610.000	2.440.000
	Tiket + airport tax	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	4	OK	256.000	1.024.000
5 2 2 26	Honorarium PNS				4.500.000
5 2 2 26	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber				4.500.000
	- Narasumber Pusat (1 org x 2 jam)	2	OJ	1.000.000	2.000.000
	- Narasumber Daerah Ess II (1 Orang x 2 jam)	2	OJ	750.000	1.500.000
	- Narasumber Daerah Ess III (1 Orang x 2 jam)	2	OJ	500.000	1.000.000
5 2 2 27	Honorarium Non PNS				1.800.000
5 2 2 27 022	Belanja Jasa Moderator				1.500.000
	- Honorarium Moderator (3 Orang)	3	O/KP	500.000	1.500.000
5 2 2 27 033	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				150.000
	- MC/Pembawa Acara (1 Orang)	1	OH	150.000	150.000
5 2 2 27 034	Belanja Jasa Pembaca Doa/Alqur'an				150.000
	- Pembaca Do'a (1 Orang)	1	OH	150.000	150.000
5 2 2 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				11.250.000
5 2 2 33 01	Belanja Vakasi				11.250.000
	- Rapat tim kelompok penyelesaian permasalahan hukum di Provinsi, dan Kab./Kota (5 KI X 15 Org)	75	OH	150.000	11.250.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					78.966.185
Triwulan I :					
Triwulan II :					
Triwulan III :					
Triwulan IV :					
				Padang, 2019	
				An. SEKRETARIS DAERAH	
				ASISTEN PEMERINTAHAN	
				Ub. KEPALA BIRO HUKUM	
					
				ENIFITA DJINIS, SH	
				Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004	
Keterangan					
Tanggal Pembahasan					
Catatan Hasil Pembahasan					
1.					
2.					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					
4.					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
	- Eselon IV/ Gol. III (1 org X 3 hari X 3 Kali)	9	OH	900.000	8.100.000
	Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. III (1 org X 2 hari X 3 Kali)	6	OM	610.000	3.660.000
	Tiket	3	OT	2.952.000	8.856.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	6	OK	190.000	1.140.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	6	OK	256.000	1.536.000
5 2 2 24	Belanja Jasa Lembaga				10.500.000
5 2 2 24	Belanja Jasa Lembaga Pengadilan				10.500.000
	- Biaya Pendaftaran Banding	2	perkara	1.000.000	2.000.000
	- Biaya Pendaftaran Kasasi	2	perkara	1.250.000	2.500.000
	- Putusan Banding	2	perkara	1.000.000	2.000.000
	- Putusan Kasasi	2	perkara	2.000.000	4.000.000
5 2 2 27	Honorarium Non PNS				8.000.000
5 2 2 27 40	Belanja Jasa Saksi				8.000.000
	- Saksi-saksi fakta penyelesaian perkara di Pengadilan	8	OK	1.000.000	8.000.000
5 2 1 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				22.500.000
5 2 1 33 01	Belanja Vakasi				22.500.000
	- Rapat pembahasan perkara/kasus (15 org x 10 kl)	150	OH	150.000	22.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					200.000.000

Triwulan I :
 Triwulan II :
 Triwulan III :
 Triwulan IV : _____


Padang, 2019
 An. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 Ub. KEPALA BIRO HUKUM



ENIFITA DJINIS, SH
 Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004

TIM ANGGARAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			BAPPEDA	
2			DPKD	
3			Biro Administrasi Pembangunan &	
4			Kerjasama Rantau	

		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020			RKA - OPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan :	4 00 01 01				Fungsi Lainnya	
Organisasi :	4 00 01 01 03				Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	
Program :	4 00 01 01 03 225				Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	
Kegiatan :	4 00 01 01 03 225 04				Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	
Waktu Pelaksanaan :	Januari s/d Desember 2020					
Alokasi Dana :	APBD					
Loka Lokasi Kegiatan :	Sumatera Barat					
Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	60.709.600	,-			
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	100.000.000	,-			
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	120.000.000	,-			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA		
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM			100%		
Masukan	Tersedianya dana pendukung			Rp. 100.000.000 ,-		
Keluaran	Tersedianya laporan RANHAM dan data produk hukum yang berperspektif HAM			1 Laporan RANHAM		
Hasil	Persentase data produk hukum berperspektif HAM			100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah provinsi, dan Kab/kota						
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Hrg Satuan		
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5	
5 2	BELANJA LANGSUNG				100.000.000	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				100.000.000	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				13.250.950	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.298.600	
	- Kertas HVS Folio	30	rim	51,500	1,545,000	
	- Tip-ex	6	kotak	16,000	96,000	
	- Ordner File Plastik luck, combo	12	buah	48,300	579,600	
	- Box File Karton	12	buah	30,200	362,400	
	- Map Snelhecter Bufallo	12	buah	7,300	87,600	
	- Ordner File Plastik	10	buah	48,300	483,000	
	- Pena my gell	2	kotak	72,500	145,000	
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas digunakan langsung untuk kegiatan)				739,100	
	- BBM	1	LS	739,100	739,100	
5 2 2 01 10	Belanja Seminar Kit Peserta				2,500,000	
	- Seminar kit peserta	50	buah	50,000	2,500,000	
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				6,713,250	
	- Catridge Printer	6	kotak	255,000	1,530,000	
	- Binder Klip 107	12	kotak	8,500	102,000	
	- Binder Klip 111	12	kotak	10,300	123,600	
	- Isi Hecter kecil	12	kotak	17,000	204,000	
	- Isi Hecter 10	12	kotak	26,500	318,000	
	- Klip paper	12	kotak	30,200	362,400	
	- Hecter Besar	1	buah	72,450	72,450	
	- Hecter (Stapler)	3	buah	23,600	70,800	
	- Toner Printer 85A	2	buah	1,000,000	2,000,000	
	- Catridge Tinta	6	buah	255,000	1,530,000	
	- Flash Disk	1	buah	100,000	100,000	
	- Spanduk Kegiatan (5 m x 1 Buah)	5	meter	60,000	300,000	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.396.250	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				3,396,250	
	- Penggandaan	9,585	lembar	250	2,396,250	
	- Penggandaan bahan rakor	4,000	lembar	250	1,000,000	
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000	
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				1,000,000	
	- Sewa ruang rapat/pertemuan	1	kali	1,000,000	1,000,000	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				3.720.000	
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				3,720,000	
	- Nasi Kotak (60 org)	60	kotak	41,000	2,460,000	
	- Snack Kotak(60 org)	60	kotak	21,000	1,260,000	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				75.332.800	
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				18,320,000	
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 14 Kali)	28	OH	500,000	14,000,000	
	- Staf Gol III/IV/Sopir (1 org X 1 hari X 12 Kali)	12	OH	360,000	4,320,000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Hrg Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				57.012.800
	- Eselon II/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	1.200.000	7.200.000
	Uang Representasi Eselon II/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	400.000	2.400.000
	Uang Penginapan Eselon III/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 2 Kali)	4	OM	1.490.000	5.960.000
	Tiket	2	OT	3.542.400	7.084.800
	Taksi Lokal Padang (PP)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	4	OK	256.000	1.024.000
	- Eselon III/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	900.000	5.400.000
	Uang Penginapan Eselon III/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 2 Kali)	4	OM	992.000	3.968.000
	Tiket	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	4	OK	256.000	1.024.000
	- Eselon IV/ Gol. III(2 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	900.000	5.400.000
	Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. III (2 org X 2 hari X 2 Kali)	4	OM	610.000	2.440.000
	Tiket	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	4	OK	256.000	1.024.000
5 2 2 26	Honorarium PNS				2.000.000
5 2 2 26 003	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				2.000.000
	- Narasumber Daerah Ess III/IV (2 Orang x 2 jam)	4	OJ	500.000	2.000.000
5 2 2 27	Honorarium Non PNS				1.300.000
5 2 2 27 22	Belanja Jasa Moderator				1.000.000
	- Honorarium Moderator (2 Orang)	2	OH	500.000	1.000.000
5 2 2 27 33	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				150.000
	- MC/Pembawa Acara (1 Orang)	1	OH	150.000	150.000
5 2 2 27 34	Belanja Jasa Pembaca Doa/Alqur'an				150.000
	- Pembaca Do'a (1 Orang)	1	OH	150.000	150.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					100.000.000



Padang, 2019
 An. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 Ub. KEPALA BIRO HUKUM


Triwulan I : _____
 Triwulan II : _____
 Triwulan III : _____
 Triwulan IV : _____


ENIFITA DJINIS, SH
 Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004


Keterangan
 Tanggal Pembahasan
 Catatan Hasil Pembahasan
 1.
 2.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				


	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA		NOMOR RKA-OPD 4.00.01.01.03.226.01	FORMULIR RKA-OPD 2.2.1	
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintahan	4.00	Fungsi Lainnya			
Organisasi	4.00.01.01	Setda Provinsi Sumatera Barat (Biro Hukum)			
Program	4.00.01.01.03.226	Program Peningkatan Budaya Hukum			
Kegiatan	4.00.01.01.03.226.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020				
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat				
Sumber Dana	: APBD				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	27.828.000	-		
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	63.118.353	-		
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	75.742.024	-		
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR	TOLOK UKUR		TARGET KINERJA		
CAPAIAN PROGRAM	Terwujudnya Sarana dan Informasi Hukum		100%		
MASUKAN	Tersedianya Dana		Rp. 63.118.353,-		
KELUARAN	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum Provinsi dan Kab/kota		19 Kab/Kota		
HASIL	Persentase peningkatan pemanfaatan perpustakaan bidang hukum di tingkat provinsi, dan Kab/Kota		100%		
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN :	Perpustakaan Khusus Hukum Provinsi, dan Kab/Kota				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER-KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			JUMLAH
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	
5 2	BELANJA LANGSUNG				63.118.353
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				63.118.353
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.382.353
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.192.700
	- Kertas HVS Folio	10	Rim	51.500	515.000
	- Pena	2	Ktk	72.500	145.000
	- Tipp Ex	2	Ktk	16.000	32.000
	- Ordner File Plastik	6	Bh	48.300	289.800
	- Pensil	1	lusin	58.000	58.000
	- Karet Penghapus	1	lusin	36.500	36.500
	- Spidol permanen	12	buah	9.700	116.400
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas				1.542.003
	- BBM	1	Ls	1.542.003	1.542.003
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				6.647.650
	- Toner printer 85A	2	buah	1.000.000	2.000.000
	- Catridge Tinta Printer	6	ktk	255.000	1.530.000
	- Isolasi bening	6	rol	28.000	168.000
	- Isolasi Kain	6	rol	13.500	81.000
	- Isolasi Hitam	6	rol	24.000	144.000
	- Penggaris besi	3	buah	20.000	60.000
	- Hecter Kecil	3	buah	23.600	70.800
	- Hecter UK 30	3	buah	72.450	217.350
	- Pisau Cutter	6	buah	35.000	210.000
	- Isi Pisau Cutter	6	ktk	6.500	39.000
	- Isi Hecter Kecil	12	ktk	17.000	204.000
	- Isi Hecter Besar	6	ktk	26.500	159.000
	- Lem	6	buah	25.000	150.000
	- Kuas Besar	3	buah	10.000	30.000
	- Kuas Kecil	3	buah	4.000	12.000
	- Gunting	3	buah	21.000	63.000
	- Pelobang Kertas	1	buah	69.500	69.500
	- Kapur Barus	30	bks	45.000	1.350.000
	- Kain Lap	20	bks	4.500	90.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.500.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	6.000	Lbr	250	1.500.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				52.236.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				28.180.000
	- Eselon III/IV (2 org X 3 hari X 1 Kali -mentawai)	6	OH	750.000	4.500.000
	- Penginapan Eselon III/IV (2 org X 2 mlm X 1 Kl -mentawai)	4	OH	600.000	2.400.000
	- Transportasi PP (2 org x 2 x 1 kl)	4	OH	220.000	880.000
	- Eselon III/Gol IV (2 org x 1 hr x 15 kl)	30	OH	500.000	15.000.000
	- Staf Gol III/II/I/Sopir (1 org x 1 hr x 15 kl)	15	OH	360.000	5.400.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				24.056.000
	Dalam rangka konsultasi ke ANRI/Perpustakaan Nasional di Jakarta				
	- Eselon III/Gol IV (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	900.000	2.700.000
	Uang Penginapan Ess III/Gol IV (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OM	992.000	1.984.000
	Tiket + airport tax	1	OT	2.952.000	2.952.000
	Taksi Lokal Padang	2	OK	190.000	380.000
	Taksi Lokal Jakarta	2	OK	256.000	512.000
	- Eselon IV/Gol III (2 org x 3 hr x 1 kl)	6	OH	900.000	5.400.000
	Uang Penginapan Ess IV/Gol III (2 org x 2 hr x 1 kl)	4	OM	610.000	2.440.000
	Tiket + airport tax (1 org x 2 kl)	2	OT	2.952.000	5.904.000
	Taksi Lokal Padang (2 org x 2 x 1 kl)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (2 org x 2 x 1 kl)	4	OK	256.000	1.024.000
	JUMLAH				63.118.353
Triwulan I :					
Triwulan II :					
Triwulan III :					
Triwulan IV :					
				PADANG, 2019	
				An. SEKRETARIS DAERAH	
				ASISTEN PEMERINTAHAN	
				Ud. KEPALA BIRO HUKUM	
					
				ENIFITA DJINIS, SH	
				Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004	
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA	NOMOR RKA-OPD 4.00.01.01.03.226.03	FORMULIR RKA-OPD 2.2.1		
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintahan : 4.00	Fungsi Lainnya				
Organisasi : 4.00.01.01	Biro Hukum Setda Prov Sumbar				
Program : 4.00.01.01.03.226	Program Sarana dan Informasi Hukum				
Kegiatan : 4.00.01.01.03.226.03	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Sumber Dana : APBD					
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 86.187.000,-					
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 175.000.000,-					
Jumlah Tahun 2021 : Rp. 210.000.000,-					
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA			
CAPAIAN PROGRAM	Terwujudnya Sarana dan Informasi Hukum	100%			
MASUKAN	Tersedianya Dana Pendukung	Rp. 175.000.000,-			
KELUARAN	Terkelolanya pendokumentasian produk hukum daerah	300 buku			
HASIL	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada portal website JDIIH dan perpustakaan	100%			
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : OPD/Aparatur Pemerintah dan Masyarakat					
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG					
MENURUT PROGRAM DAN PER-KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5 2	BELANJA LANGSUNG				175.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				175.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.644.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.365.600
	- Kertas HVS Folio	30	rim	51.500	1.545.000
	- Pena my gell	2	kotak	72.500	145.000
	- TipEx	6	kotak	16.000	96.000
	- Ordner File Plastik	12	buah	48.300	579.600
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas digunakan langsung untuk kegiatan)				885.150
	- BBM	1	LS	885.150	885.150
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				3.393.250
	- Binder Klip 107	12	kotak	8.500	102.000
	- Binder Klip 111	12	kotak	10.300	123.600
	- Isi Hecter kecil	12	kotak	17.000	204.000
	- Isi Hecter 10	12	kotak	26.500	318.000
	- Klip paper	12	kotak	30.200	362.400
	- Hecter Besar	1	buah	72.450	72.450
	- Hecter (Stapler)	3	buah	23.600	70.800
	- Toner Printer 85A	1	buah	1.000.000	1.000.000
	- Catridge Printer	4	buah	255.000	1.020.000
	- CD-RW/DVD-RW	12	buah	10.000	120.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				45.980.000
5 2 2 06 01	Belanja cetak				44.000.000
	- Cetak Perda (Lembaran Lepas)	100	buku	40.000	4.000.000
	- Cetak Lembaran Daerah Tahun 2019	100	buku	100.000	10.000.000
	- Cetak Berita Daerah Tahun 2019	100	buku	300.000	30.000.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1.980.000
	- Penggandaan bahan dan data/administrasi lainnya	6.000	lembar	250	1.500.000
	- Jilid peraturan Perundang-undangan	12	Eks	40.000	480.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				98.376.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				17.680.000
	Dalam rangka pengembangan sistem JDIIH				
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 13 Kali)	26	OH	500.000	13.000.000
	- Staf Gol III/II/I/Sopir (1 org X 1 hari X 13 Kali)	13	OH	360.000	4.680.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				80.696.000
	Dalam rangka konsultasi JDIIH di BPHN/instansi terkait, dan mengikuti pertemuan berkala JDIIH				
	- Eselon III/ Gol. IV (1 org X 3 hari X 4 Kali)	12	OH	900.000	10.800.000
	Uang Penginapan Eselon III/ Gol. IV (1 org X 2 hari X 4 Kali)	8	OM	992.000	7.936.000
	Tiket	4	OT	2.952.000	11.808.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	8	OK	190.000	1.520.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	8	OK	256.000	2.048.000
	- Eselon IV/ Gol. III (2 org X 3 hari X 3 Kali)	18	OH	900.000	16.200.000
	Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. III (2 org X 2 hari X 3 Kali)	12	OM	610.000	7.320.000
	Tiket	6	OT	2.952.000	17.712.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	12	OK	190.000	2.280.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	12	OK	256.000	3.072.000
5 2 2 30	Belanja Kontribusi				6.000.000
5 2 2 30 01	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang				6.000.000
	- Kontribusi kepesertaan pelatihan/pertemuan JDIIH (2 org)	2	OK	3.000.000	6.000.000
5 2 2 26	Honorarium PNS				18.000.000
5 2 2 26 09	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbang				18.000.000
	- Operator pengelola JDIIH (3 org x 12 bh)	36	OB	500.000	18.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					175.000.000
Triwulan I :					
Triwulan II :					
Triwulan III :					
Triwulan IV :					
Padang, 2019 An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM					
					
ENIFITA DJINIS, SH Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					


		RENCANA KERJA ANGGARAN UNIT KERJA	FORMULIR RKA-OPD		
		PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020	2.2.1		
Urusan Pemerintahan : 4 00 01 01 Organisasi : 4 00 01 01 03 Program : 4 00 01 01 03 227 Kegiatan : 4 00 01 01 03 227 01	Fungsi Lainnya Sekretariat Daerah (Biro Hukum) Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota				
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020 Alokasi Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 92.877.900 - Jumlah Tahun 2020 : Rp. 320.000.000 - Jumlah Tahun 2021 : Rp. 384.000.000 -					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan		100%		
Masukan	Dana yang tersedia		Rp. 320.000.000 -,-		
Keluaran	Terlaksananya evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		45 Ranperda Kab/Kota		
Hasil	Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Ranperda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pemerintah Daerah Kab./Kota				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA	
1	2	3	4	5	6=3x5
5 2	BELANJA LANGSUNG				320.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				320.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.468.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.971.000
	- Kertas HVS Folio	30	rim	51.500	1.545.000
	- Pena my gell	2	kotak	72.500	145.000
	- Tip-ex	2	kotak	16.000	32.000
	- IMap Snelchecter	50	lembar	7.300	365.000
	- Box File Karton	24	buah	30.200	724.800
	- Ordner File Plastik	24	buah	48.300	1.159.200
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mobilitas digunakan langsung untuk kegiatan				1.151.900
	- BBM	1	LS	1.151.900	1.151.900
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				4.345.100
	- Binder Klip kecil	12	kotak	8.500	102.000
	- Binder Klip sedang	12	kotak	10.300	123.600
	- Binder Klip besar	12	kotak	12.100	145.200
	- Flash disk	1	buah	100.000	100.000
	- Toner Printer 85A	2	kotak	1.000.000	2.000.000
	- Hekter	3	buah	23.600	70.800
	- Isi Hekter	12	kotak	17.000	204.000
	- Pelombang kertas	1	bh	69.500	69.500
	- Catridge Printer	6	kotak	255.000	1.530.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.200.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				5.200.000
	- Penggandaan bahan rapat	20.800	lembar	250	5.200.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				21.798.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				21.798.000
	- Snack Rapat (21 org x 45 kl)	945	kotak	21.000	19.845.000
	- Nasi kotak (21 org x 3 kl)	63	kotak	31.000	1.953.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				141.784.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				23.120.000
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 17 kl)	34	OH	500.000	17.000.000
	- Staf Gol III/II/I /Sopir(1 org X 1 hari X 17 kl)	17	OH	360.000	6.120.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				118.664.000
	- Eselon II/Gol.IV (1 org X 3 hari X 4 Kali)	12	OH	1.200.000	14.400.000
	Uang Representasi Eselon II (1 org x 3 hari x 4 Kali)	12	OH	400.000	4.800.000
	Uang Penginapan Eselon II (1 org X 2 hari X 4 Kali)	8	OM	1.490.000	11.920.000
	Tiket+airport tax	4	OT	2.952.000	11.808.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	8	OK	190.000	1.520.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	8	OK	256.000	2.048.000
	- Eselon III/Gol.IV (1 org X 3 hari X 3 Kali)	9	OH	900.000	8.100.000
	Uang Penginapan Eselon III (1 org X 2 hari X 3 Kali)	6	OM	992.000	5.952.000
	Tiket+airport tax	3	OT	2.952.000	8.856.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	6	OK	190.000	1.140.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	6	OK	256.000	1.536.000
	- Eselon IV/Gol.III (2 org X 3 hari X 3 Kali)	18	OH	900.000	16.200.000
	Uang Penginapan Eselon IV (2 org X 2 hari X 3 Kali)	12	OM	610.000	7.320.000
	Tiket+airport tax	6	OT	2.952.000	17.712.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	12	OK	190.000	2.280.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	12	OK	256.000	3.072.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA	
1	2	3	4	5	6=3x5
5 2 2 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				141.750.000
5 2 2 33 01	Belanja Vakasi				141.750.000
	- Rapat Pembahasan produk hukum daerah Kab./Kota (21 Orang X 45 kali)	945	OH	150.000	141.750.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					320.000.000
Triwulan I : _____ Triwulan II : _____ Triwulan III : _____ Triwulan IV : _____					Padang, 2019 An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN Ub. KEPALA BIRO HUKUM  <u>ENIFITA DJINIS, SH</u> Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA ANGGARAN UNIT KERJA		FORMULIR RKA-OPD		
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020		2.2.1		
Urusan Pemerintahan	: 4 0001 01		Fungsi Lainnya		
Organisasi	: 4 0001 01 03		Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program	: 4 0001 01 03 227		Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan		
Kegiatan	: 4 0001 01 03 227 02		Klarifikasi dalam rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab./Kota		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020				
Alokasi Dana	: APBD				
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	116.078.700	,-		
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	270.000.000	,-		
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	324.000.000	,-		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	: Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan			100%	
Masukan	: Dana yang tersedia			Rp. 270.000.000 ,-	
Keluaran	: - Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan Perda Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kabag Hukum Kab./Kota			- 45 Perda Kab/Kota Kab /Kota - 38 orang peserta	
Hasil	: Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Daerah Kab./Kota				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6=3x5
5 2	BELANJA LANGSUNG				270.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				270.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.687.700
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.206.400
	- Kertas HVS Folio	30	rim	51.500	1.545.000
	- Pena my gell	2	ktk	72.500	145.000
	- Box File karton	12	bh	30.200	362.400
	- Pensil	1	ktk	58.000	58.000
	- Type-Ex	6	bh	16.000	96.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Miyak/Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				837.800
	- BBM	1	ls	837.800	837.800
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				3.743.500
	- Catridge Printer	12	bh	255.000	3.060.000
	- Flash disk	1	bh	100.000	100.000
	- Isi Hekcter kecil	12	ktk	17.000	204.000
	- Isi Hekcter besar	3	ktk	26.500	79.500
	- Spanduk kegiatan (5 m x 1 buah)	5	meter	60.000	300.000
5 2 2 01 16	Belanja Seminar Kit				1.900.000
	- Seminar Kit	38	org	50.000	1.900.000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				4.542.400
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Akomodasi				
	- Narasumber Pusat	1	OM	1.000.000	1.000.000
5 2 2 03 20	Belanja Transportasi				
	- Narasumber Pusat (1 org)	1	OT	3542400	3.542.400
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				4.733.500
	- Penggandaan Bahan Rapat	14.934	lbr	250	3.733.500
	- Penggandaan Bahan Rakor	4.000	lbr	250	1.000.000
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.000.000
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				1.000.000
	- Sewa ruang rapat/pertemuan	1	kali	1.000.000	1.000.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				24.898.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				21.798.000
	- Snack Rapat (21 org x 45 kali)	945	kotak	21.000	19.845.000
	- Nasi Kotak 1 protein (21 org x 3 kali)	63	kotak	31.000	1.953.000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				3.100.000
	- Nasi kotak	50	kotak	41.000	2.050.000
	- Snack	50	kotak	21.000	1.050.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6=3x5
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				79.588.400
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Upaya Pengawasan terhadap Perda/Perkada Kab./Kota - Eselon III/IV (3 org X 3 hari X 1 Kali -mentawai) - Penginapan Eselon III/IV (3 org X 2 mlm X 1 Kl -mentawai) - Transportasi PP (3 org x 2 x 1 kl) - Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 17 kab./kota) - Staf Gol III/II/I /sopir (1 org X 1 hari X 17 kab./kota)				34.790.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Dalam Rangka Klarifikasi Peraturan Daerah Ke Kementerian dan Lembaga Terkait - Eselon II/Gol.IV (1 org X 3 hari X 1 Kali) Uang Representasi Eselon II (1 org x 3 hari x 1 kali) Uang Penginapan Eselon II (1 org X 2 hari X 1 Kali) Tiket+airport tax Taksi Lokal Padang (PP) Taksi Lokal Jakarta (PP) - Eselon III/Gol.IV (1 org X 3 hari X 2 Kali) Uang Penginapan Eselon III (1 org X 2 hari X 2 Kali) Tiket+airport tax Taksi Lokal Padang (PP) Taksi Lokal Jakarta (PP) - Eselon IV/Gol.III (1 org X 3 hari X 2 Kali) Uang Penginapan Eselon IV (1 org X 2 hari X 2 Kl) Tiket+airport tax Taksi Lokal Padang (PP) Taksi Lokal Jakarta (PP)				44.798.400
5 2 2 25	Belanja Honorarium Non Pegawai				3.500.000
5 2 2 25 01	Belanja Jasa Narasumber Daerah (1 org x 2 jam) Belanja Jasa Narasumber Pusat (1 org x 2 jam)				
5 2 2 27 22	Belanja Jasa Moderator (1 org)				1.300.000
5 2 2 27 33	Belanja Jasa MC/Pembawa acara (1 org)				
5 2 2 27 34	Belanja Jasa Pembaca doa (1 org)				
5 2 2 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				141.750.000
5 2 2 33 01	Belanja Vakasi - Rapat Pembahasan produk hukum daerah Kab./Kota (21 org x 45 kali)				141.750.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					270.000.000
Triwulan I :					
Triwulan II :					
Triwulan III :					
Triwulan IV :					
				Padang, 2019	
				An. SEKRETARIS DAERAH	
				ASISTEN PEMERINTAHAN	
				Ub. KEPALA BIRO HUKUM	
					
				<u>ENIFITA DJINIS, SH</u>	
				Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004	
Keterangan					
Tanggal Pembahasan					
Catatan Hasil Pembahasan					
1.					
2.					
3.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
NO	NAMA	NIP	JABATAN		
1					
2					
3					
4					

SUMATERA BARAT	RENCANA KERJA ANGGARAN UNIT KERJA		FORMULIR RKA-OPD		
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020		2.2.1		
Urusan Pemerintahan	: 4 00 01 01		Fungsi Lainnya		
Organisasi	: 4 00 01 01 03		Sekretariat Daerah (Biro Hukum)		
Program	: 4 00 01 01 03 227		Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan		
Kegiatan	: 4 00 01 01 03 227 03		Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember 2020				
Alokasi Dana	: APBD				
Lokasi Kegiatan	: Sumatera Barat				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	99.884.200	,-		
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	239.768.203	,-		
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	287.721.844	,-		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	: Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan			100%	
Masukan	: Dana yang tersedia			Rp. 239.768.203 ,-	
Keluaran	: Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap Perkada dan Per. DPRD Kab/Kota sesuai dg Peraturan Perundang-undangan yg berlaku			45 Perkada/Per. DPRD Kab/Kota	
Hasil	: Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perkada dan Peraturan DPRD Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Daerah Kab./Kota				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6=3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				239.768.203
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				239.768.203
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				7.848.403
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.059.000
	- Kertas HVS Folio	20	rim	51.500	1.030.000
	- Pena my gell	2	lusin	72.500	145.000
	- Box File karton	24	bh	30.200	724.800
	- Ordener File Plastik	24	bh	48.300	1.159.200
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Miyak/Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				977.803
	- BBM	1	ls	977.803	977.803
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				3.811.600
	- Binder Klip kecil	6	kotak	8.500	51.000
	- Binder Klip sedang	6	kotak	10.300	61.800
	- Binder Klip besar	6	kotak	12.100	72.600
	- Flash disk	1	buah	100.000	100.000
	- Toner Printer 85A	2	kotak	1.000.000	2.000.000
	- Hekter	2	buah	23.600	47.200
	- Isi Hekter	12	kotak	17.000	204.000
	- Catridge Printer	5	kotak	255.000	1.275.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.938.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				
	- Penggandaan bahan rapat	11.752	lbr	250	2.938.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				23.751.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				23.751.000
	- Snack Rapat (21 org x 45 kali)	945	kotak	21.000	19.845.000
	- Nasi Kotak 1 protein (21 org x 6 kali)	126	kotak	31.000	3.906.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				63.480.800
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				22.760.000
	Melakukan monitoring dan pembinaan dalam rangka klarifikasi terhadap produk hukum daerah Kab./Kota				
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 17 Kab./Kota)	34	OH	500.000	17.000.000
	- Staf Gol III/II/sopir (1 org X 1 hari X 16 Kab./Kota)	16	OH	360.000	5.760.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6=3X5
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				40.720.800
	Konsultasi ke Pemerintah Pusat Dalam Rangka Fasilitas Produk Hukum Daerah Kab./kota				40.720.800
	- Eselon II/Gol.IV (1 org X 3 hari X 2 Kali)	6	OH	1.200.000	7.200.000
	Uang Representasi Eselon II (1 org x 3 hari x 2 kali)	6	OH	400.000	2.400.000
	Uang Penginapan Eselon II (1 org X 2 hari X 2 Kali)	4	OM	1.490.000	5.960.000
	Tiket+airport tax	2	OT	3.542.400	7.084.800
	Taksi Lokal Padang (PP)	4	OK	190.000	760.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	4	OK	256.000	1.024.000
	- Eselon III/Gol.IV (1 org X 3 hari X 1 Kali)	3	OH	900.000	2.700.000
	Uang Penginapan Eselon III (1 org X 2 hari X 1 Kali)	2	OM	992.000	1.984.000
	Tiket+airport tax	1	OT	2.952.000	2.952.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	2	OK	190.000	380.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	2	OK	256.000	512.000
	- Eselon IV/Gol.III (1 org X 3 hari X 1 Kali)	3	OH	900.000	2.700.000
	Uang Penginapan Eselon IV (1 org X 2 hari X 1 Kl)	2	OM	610.000	1.220.000
	Tiket+airport tax	1	OT	2.952.000	2.952.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	2	OK	190.000	380.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	2	OK	256.000	512.000
5 2 2 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				141.750.000
5 2 2 33 01	Belanja Vakasi				141.750.000
	- Rapat Pembahasan produk hukum daerah Kab./Kota (21 org x 45 kali)	945	OH	150.000	141.750.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					239.768.203
Triwulan I :					
Triwulan II :					
Triwulan III :					
Triwulan IV :	_____				
				Padang, 2019	
				An. SEKRETARIS DAERAH	
				ASISTEN PEMERINTAHAN	
				Ub. KEPALA BIRO HUKUM	
					
				ENIFITA DJINIS, SH	
				Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004	
Keterangan					
Tanggal Pembahasan					
Catatan Hasil Pembahasan					
1.					
2.					
3.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1					
2					
3					
4					

	RENCANA KERJA ANGGARAN UNIT KERJA	FORMULIR RKA-OPD
	PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020	2.2.1

Urusan Pemerintahan :	4 00 01 01	Fungsi Lainnya
Organisasi :	4 00 01 01 03	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
Program :	4 00 01 01 03 227	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan :	4 00 01 01 03 227 04	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
Alokasi Dana : APBD
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

Jumlah Tahun 2019 :	Rp.	165.792.600	-
Jumlah Tahun 2020 :	Rp.	350.000.000	-
Jumlah Tahun 2021 :	Rp.	420.000.000	-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%
Masukan	: Dana yang tersedia	Rp. 350.000.000 -
Keluaran	: Terlaksananya fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	50 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah
Hasil	: Persentase rekomendasi kajian materi/substansi draft/rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/kota	100%
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Daerah Kab./Kota	

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6=3X5
5 2	BELANJA LANGSUNG				350.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				350.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.120.400
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.437.000
	- Kertas HVS Folio	40	rim	51.500	2.060.000
	- Pena my gell	6	kotak	72.500	435.000
	- Box File karton	12	bh	30.200	362.400
	- Ordener File Plastik	12	bh	48.300	579.600
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Miyak/Gas Sarana Mobilitas (digunakan langsung untuk kegiatan)				968.000
	- BBM	1	ls	968.000	968.000
5 2 2 01 12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis				3.715.400
	- Toner Printer 85A	2	bh	1.000.000	2.000.000
	- Binder Klip kecil	6	kotak	8.500	51.000
	- Binder Klip sedang	6	kotak	10.300	61.800
	- Binder Klip besar	6	kotak	12.100	72.600
	- Catridge Printer	6	bh	255.000	1.530.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.750.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				
	- Penggandaan bahan rapat	23.000	lbr	250	5.750.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				25.956.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				25.956.000
	- Snack Rapat (21 org x 45 kali)	1.050	kotak	21.000	22.050.000
	- Nasi Kotak 1 protein (21 org x 6 kali)	126	kotak	31.000	3.906.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				152.673.600
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				23.120.000
	Melakukan monitoring dan pembinaan dalam rangka fasilitasi terhadap produk hukum daerah Kab./Kota				
	- Eselon III/IV (2 org X 1 hari X 17 Kab./Kota)	34	OH	500.000	17.000.000
	- Staf Gol III/II/II/sopir (1 org X 1 hari X 17 Kab./Kota)	17	OH	360.000	6.120.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6=3X5
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				129.553.600
	Konsultasi ke Pemerintah Pusat Dalam Rangka Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab./kota				129.553.600
	- Eselon II/Gol.IV (1 org X 3 hari X 4 Kali)	12	OH	1.200.000	14.400.000
	Uang Representasi Eselon II (1 org x 3 hari x 4 Kali)	12	OH	400.000	4.800.000
	Uang Penginapan Eselon II (1 org X 2 hari X 4 Kali)	8	OM	1.490.000	11.920.000
	Tiket+airport tax	4	OT	3.542.400	14.169.600
	Taksi Lokal Padang (PP)	8	OK	190.000	1.520.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	8	OK	256.000	2.048.000
	- Eselon III/Gol.IV (1 org X 3 hari X 4 Kali)	12	OH	900.000	10.800.000
	Uang Penginapan Eselon III (1 org X 2 hari X 4 Kali)	8	OM	992.000	7.936.000
	Tiket+airport tax	4	OT	2.952.000	11.808.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	8	OK	190.000	1.520.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	8	OK	256.000	2.048.000
	- Eselon IV/Gol.III (2 org X 3 hari X 3 Kali)	18	OH	900.000	16.200.000
	Uang Penginapan Eselon IV (2 org X 2 hari X 3 Kali)	12	OM	610.000	7.320.000
	Tiket+airport tax	6	OT	2.952.000	17.712.000
	Taksi Lokal Padang (PP)	12	OK	190.000	2.280.000
	Taksi Lokal Jakarta (PP)	12	OK	256.000	3.072.000
5 2 2 33	Belanja Vakasi/Verifikasi				157.500.000
5 2 2 33 01	Belanja Vakasi				157.500.000
	- Rapat Pembahasan produk hukum daerah Kab./Kota (21 org x 50 kali rapat)	1.050	OH	150.000	157.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					350.000.000

Triwulan I :
 Triwulan II :
 Triwulan III :
 Triwulan IV : _____

Padang, 2019
 An. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 Ub. KEPALA BIRO HUKUM



ENIFITA DJINIS, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004

Keterangan
 Tanggal Pembahasan
 Catatan Hasil Pembahasan
 1.
 2.
 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Rencana Kerja tahun 2020 pada Biro Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2018 dan proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2019, sehingga tugas dan fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya.

Beberapa catatan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diantaranya:

1. Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan.
2. Renja Biro Hukum Tahun 2020 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum pada tahun bersangkutan.
3. Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro Hukum menjadi lebih baik.
4. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Point-point yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada tahun anggaran 2020 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2020, sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, Januari 2019

An. **SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
Ub. KEPALA BIRO HUKUM**

89


ENIFITA DJINIS, SH

Pembina Utama Muda,

NIP. 19620330 198903 2 004